Abdurrahman Wahid

Membaca Sejarah Nusantara

25 Kolom Sejarah Gus Dur

Pengantar:
KH.A. Mustofa Bisri

LKiS

MEMBACA SEJARAH NUSANTARA
25 Kolom Sejarah Gus Dur

Abdurrahman Wahid

Membaca Sejarah Nusantara

25 Kolom Sejarah Gus Dur

Pengantar:

KH.A. Mustofa Bisri

LKiS

MEMBACA SEJARAH NUSANTARA
25 Kolom Sejarah Gus Dur
Abdurrahman Wahid

xx + 134 halaman; 12 x 18 cm
1. Nasionalisme 2. *Civil society*
3. Pluralisme 4. Sejarah nasional
ISBN: 979-25-5307-x
ISBN 13: 978979-25-5307-9

Pengantar: KH. A. Mustofa Bisri
Editor: M. Imam Aziz
Penyelaras Akhir: Ahmala Arifin
Rancang Sampul: Haitami el Jaid
layout: Santo

Penerbit dan Distribusi:
***LKiS* Yogyakarta**
Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis km. 4,4 Yogyakarta
Telp:. (0274) 387194
Faks:. (0274) 379430
http://www.lkis.co.id
e-mail: lkis@lkis.co.id

Cetakan I: Januari 2010

Percetakan:
***LKiS* Printing Cemerlang**
Jl. Salakan Baru No. 3 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis km. 4,4 Yogyakarta
Telp:. (0274) 417762
e-mail: elkisprinting@yahoo.com

Pengantar Redaksi

Politik bagi Gus Dur merupakan sesuatu yang sangat nyata, sebagai pergulatan gagasan-gagasan dan kekuatan-kekuatan. Masa kepresidenan Gus Dur yang singkat menggambarkan betapa pergulatan itu sangat mendebarkan, dalam suatu arena yang cukup 'bebas' untuk tarik tolak kepentingan-kepentingan. Ketidakpastian, demikian seorang pengamat Indonesia menjelaskan politik di sini. Pergantian kekuasaan selalu diwarnai ketidakpastian. Adakalanya dibarengi oleh kekerasan. Adakalanya dengan intrik dan tipu muslihat.

Peristiwa SI 23 Juli 2001 yang menghentikan Gus Dur dari kepresidenan sudah berlalu. Orang toh gampang melupakan soal itu. Karena itu, Gus Dur pun terus menulis dan menuangkan gagasannya. Gus Dur mulai menuangkan gagasannya kembali tak lama setelah pulang dari perjalanannya di Amerika Serikat. Salah satu tema yang sangat menarik untuk kita ketahui adalah kolom-kolom Gus Dur tentang sejarah (Nusantara). Setidaknya, terdapat dua puluh lima kolom yang ditulis Gus Dur.

Dalam membaca sejarah Nusantara ini, yang tampaknya ingin diingatkan oleh Gus Dur adalah

mengenai sejarah panjang pertumbuhan kita sebagai bangsa yang melampaui konsep-konsep "nasionalisme" yang secara teoretis baru dikenal pada akhir abad ke-19. Gus Dur mengingatkan bahwa bangsa ini telah tumbuh jauh sebelum orang mengatakannya sebagai bangsa modern. Tapi orang sering lupa dengan pertumbuhan kita, dan orang cenderung menunjuk bahwa dirinyalah yang paling berhak menentukan corak negara-bangsa ini atas klaim keistimewaan agama, etnis, ideologi. Artinya, pandangan nasionalisme model ini lebih menunjukkan bobot kekuasaannya daripada niat menciptakan sistem kehidupan bersama yang lebih baik dan demokratis. 'Mungkinkah terjadi proses demokratisasi yang sebenarnya kalau hanya membicarakan nasionalisme dalam merebut kekuasaan negara...', tulis Gus Dur.

Jika dipahami gagasan inti tersebut, dapat dimengerti apabila Gus Dur berupaya terus memperjuangkan demokrasi dengan dasar pandangan nasionalismenya yang berbeda dengan gagasan sementara pemimpin partai politik maupun tentara saat ini. Demokratisasi adalah demokratisasi, bukan perebutan kekuasaan... Tapi, siapa peduli?

Buku ini merupakan versi baru dari buku Gus Dur yang telah kami terbitkan beberapa tahun sebelumnya, dengan judul *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser* (*LKiS*, 2002). Kami merasa kumpulan kolom sejarah Gus Dur dalam buku tersebut sangat berharga untuk kita baca kembali

sebagai khazanah yang beliau tinggalkan, dan karena itu kami terbitkan kembali dalam versi yang baru dengan judul *Membaca Sejarah Nusantara: Dua Puluh Lima Kolom Sejarah Gus Dur.*

Gus, setelah *Sampeyan* pergi, mungkin hanya dengan menebarkan gagasan dan merawat pluralisme untuk kemaslahatan bangsa, kami mengenangmu sebagai pahlawan, lebih dari sekadar simbol dan gelar formalitas. Selamat jalan Gus, kami merindukanmu...

Kepada sidang pembaca yang budiman, kami sampaikan selamat membaca...!

Kolom-Kolom Mantan Presiden
KH. A. Mustofa Bisri

Enaknya orang yang memiliki kemampuan dan kelebihan, sekaligus sikap percaya diri, *i'timad 'ala an-nafs*, antara lain: dia bisa dengan mudah mendapat kedudukan tanpa harus 'menyayangi' (merasa eman terhadap) kedudukan itu, seberapa pun tingginya. Sehingga bila harus meninggalkan kedudukannya, ia tidak terlarut olehnya, apalagi sampai terkena. sindrom. Berbeda dengan mereka yang hanya mengandalkan 'pulung' dan atau rekayasa penjilatan dalam mendapatkan kedudukan.

Gus Dur, KH Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-4, adalah salah seorang yang memiliki kemampuan dan kelebihan, sekaligus sikap *i'timad 'alan-nafs* (bahkan ada yang menilai sikap *i'timad 'alan nafs*-nya berlebih). Maka ketika mendapat kedudukan—tidak tanggung-tanggung—sebagai presiden, dia tidak tampak kegirangan (tidak seperti sementara orang yang diangkat menjadi menteri saja sudah mengadakan tasyakuran besar-besaran), dan ketika dipaksa lengser pun tidak tampak tergoncang seperti yang mungkin diperkirakan orang sebelumnya. Dengan ke-

mampuan, kelebihan, dan kepercayaan dirinya, tokoh paling kontroversial ini, meneruskan perjalanannya seperti biasa. Kegemarannya berkeliling memenuhi undangan umatnya, bersilaturahmi kepada kawan-kawannya, dan menerima tamu siapa saja yang memerlukannya, masih dan justru lebih dahsyat volumenya, karena kesempatannya memang jauh lebih longgar. Demikian pula dengan kebiasaannya menuangkan renungan-renungannya. (Boleh jadi karena inilah, banyak orang dekatnya, terutama yang ketika ia menjadi presiden merasa kehilangan, kini justru menemukannya kembali).

Seingat saya, begitu lengser Gus Dur langsung kembali meneruskan kebiasaannya: muter-muter, bersilaturahmi ke sana ke mari. Tidak sampai tiga bulan setelah lengser, kolom-kolomnya kembali muncul begitu deras. Dalam jangka waktu—enam belas bulan, September 2001 s/d 10 Maret 2002—tidak kurang dari 54 artikel, dalam berbagai tema, telah ditulisnya. Lima puluh empat artikel yang ditulis dalam era lengser itu, ditambah satu artikel ketika masih menjabat presiden, kemudian dikumpulkan dan jadilah buku ini—buku yang sekarang ada di tangan pembaca ini adalah versi baru, seperti telah kami jelaskan pada pengantar redaksi (*red.*).

❧

Ketika saya diminta oleh Gus Dur sendiri untuk menulis pangantar bukunya ini, secara kelakar hati kecil saya nyletuk: Ini trik apalagi? Soalnya, siapa atau

apa yang harus saya antar? Apakah perlu Gus Dur diantar? Atau apa perlu mengantar Anda kepada Gus Dur? Gus Dur sudah tahu mau ke mana, sudah tahu apa yang akan diberikan atau diminta kepada dan dari siapa, sudah tabu harus 'naik apa' dan lewat mana. Sementara Anda sendiri pun sudah tahu siapa Gus Dur, tahu di mana menemuinya dan kapan. Tiba-tiba saya teringat pengalaman ketika dulu di Kairo. Dalam sebuah diskusi, setelah Gus Dur bicara, ada seorang kawan yang angkat bicara menanggapinya. Kawan ini mengatakan bahwa dia sangat sependapat dengan apa yang dikatakan Gus Dur. Namun ketika ia mencoba menjelaskan kembali apa yang ia setujui itu, ternyata apa yang dikatakannya jauh bertolak belakang dari apa yang dimaksudkan dan dikatakan Gus Dur. Tentu saja mereka yang memahami, jadi kasihan kepada Gus Dur. Saya pun mula-mula khawatir jangan-jangan saya, seperti kawan saya itu; niat hati mengantar alih-alih malah menyesatkan. Namun karena tulisan Gus Dur relatif lebih gamblang ketimbang ucapannya, mengantarnya pun tidak perlu repot-repot.

ଔ

Dari tiga bagian kumpulan kolomnya ini (dalam buku versi sebelumnya, *red.*) mungkin yang paling menarik adalah Bagian Pertama (yang sekarang menjadi versi baru ini, *red.*) di mana Gus Dur melihat sejarah masa lalu, melalui kaca matanya yang jeli, kritis, unik, dan *nekat*, sehingga, seperti biasa,

kemungkinan besar orang akan terkaget-kaget atau setidaknya tergelitik membaca tafsir dan spekulasinya terhadap sesuatu peristiwa sejarah. Sesuatu yang selama ini mungkin sudah umum dipercayai sebagai 'kebenaran sejarah', tiba-tiba digoyangnya sedemikian rupa sehingga mau tidak mau orang pun tergelitik untuk melakukan peninjauan ulang.

Sejarah—barang kali sebagaimana juga sosok Gus Dur—agaknya memang tak pernah dapat lepas dari kontroversi. Apalagi sejarah yang sudah lama berlalu, ia begitu terbuka terhadap berbagai versi tafsiran yang memang tidak bisa dihindari. Ambil contoh misalnya, Walisongo yang dalam sejarah disebut sebagi para pemimpin dan da'i yang mengislamkan Tanah Jawa. Bukan saja orang berbeda pendapat mengenai asal usul sebutan *Walisanga* itu (ada yang berpendapat "Sanga" berasal dari bahasa Jawa "Songo" yang berarti sembilan; ada yang berpendapat berasal dari kata "sana" yang berarti tempat atau daerah; dan ada pula yang berpendapat berasal dari kata Arab "Tsanaa" yang berarti pujian mulia), tapi juga berbeda mengenai pengertiannya. Ada yang mengatakan bahwa jumlah wali itu memang sembilan (dan sembilan ini penulis sejarah pun berbeda mengenai siapa-siapa orangnya dan masa hidupnya). Ada yang mengatakan jumlahnya banyak secara berganti-ganti (model wali *abdal*); dan ada pula yang mengatakan bahwa Walisanga itu semacam lembaga di mana di setiap wilayah ada pejabat walinya. Belum lagi perbedaan tentang dari mana—sebagian—para wali itu berasal, Arab, Samarqand (Uzbekistan),

China, Sumatra, atau Jawa. Bahkan ada seorang penulis sejarah tanah Jawa yang mengatakan bahwa dalam kitab Walisanga, wali-wali yang dinyatakan sebagai Walisanga itu hanya ada delapan; selain yang delapan itu disebut *Wali Nukba* (*nuqabaa*?). Anehnya, dalam kitab yang katanya dikarang oleh Sunan Giri II itu, disebutkan—dalam langgam Asamaradana—nama-nama *Wali Nukba* yang memasukkan juga nama-nama: Ki Ageng Kenanga, Juru Mertani, dan Sultan Agung (1613-1645). Contoh lain yang dalam buku Gus Dur ini juga dibicarakan adalah sejarah Raden Wijaya yang menurut Ensiklopedi Indonesia (EI) hidup di abad ke-13 (1294-1309), sementara sumber yang lain menyebutkan tahun 1441-1451. Raja yang disebut-sebut sebagai Brawijaya I, pendiri Majapahit (disebut juga Kertawijaya dan di *Babad Tanah Jawi* disebut Raden Susuruh) ini, umum disebut-sebut sebagai Raja Hindu-Budha yang hidup sebelum masa Walisanga. Namun, ada 'cerita tutur' (istilahnya Gus Dur) yang menyebutkan bahwa raja ini pernah didakwahi oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang menurut *EI* wafat 1481 atau menurut sumber lain sekitar tahun 1457 putera Malik Ibrahim al-Maghribi yang wafat tahun 1419 (Maulana Malik Ibrahim dan Brawijaya I adalah sama-sama menantu Prabu Kiyan, Raja Campa, yang berarti Sunan Ampel keponakan pendiri Majapahit itu sendiri), seperti ditulis KH. Bisri Mustafa dalam Tarikh *Auliyaa*-nya. Jadi, tidak terlalu *ngoyo woro*, meski terkesan aneh, bila Gus Dur dalam tulisannya membuat spekulasi;

ada kemungkinan Raden Wijaya itu muslim dan keturunan China ber-*she* atau bermarga, *Oei* (jadi satu *she* dengan, misalnya, Oei Tjeng Hien alias Haji Abdul Karim, Tokoh PITI itu).

Cerita mengenai pasukan China yang bersama-sama Raden Wijaya mengalahkan pamannya Jayakatwang alias jayakatong bin Narasinga, yang membunuh mertuanya Kertanegara, Gus Dur pun berbeda. Bukan Kubilai Khan dan pasukannya yang menyerang Jayakatwang dibantu Raden Wijaya, melainkan Raden Wijaya-lah yang dibantu pasukan China di bawah perwira-perwira angkatan laut beragama Islam (sebagaimana Laksamana Ma Chengho/Ma Zenghe, pendiri Singapura). Pendiri ini pun masih harus ditambah dengan perbedaan yang lain, yaitu tentang motivasi penyerangan: balas dendam, perluasan kekuasaan, soal agama, atau yang lain. Cerita-cerita sejarah masa lalu semacam itu masih banyak lagi dilihat dan diceritakan Gus Dur—yang tampaknya juga membaca rujukan-rujukan, baik yang 'baku' maupun tidak, seperti *Kidung Pararapen*, Nagara Kertagama-nya Pujangga Istana Prapanca, *Serat Centhini, Serat Cebolek, Babad Tanah Jawi, Babad Diponegoro, Kidung Kebo, Pakem Kajen,* dsb. Di samping pendapat ahli-ahli sejarah semacam Dr Taufik Abdullah, Yan Romien (Belanda), Charles Issawi (Libanon), Mohamad Yamin, Kuntowijoyo, hingga ahli purbakala, R. Boechori—tentu saja dengan 'versi'-nya sendiri. Ada cerita tentang asal usul kedatangan orang Arab dan China ke Indonesia; tentang Pangeran Diponegoro; tentang Kerajaan Banten;

tentang penyerangan Sultan Agung ke Batavia, dan masih banyak lagi. Tapi yang lebih menarik, di samping melakukan penafsiran-penafsiran, Gus Dur hampir selalu bisa mengaitkan cerita-cerita sejarah lama itu dengan kehidupan masa kini; seperti mengaitkan kisah Perang Bubat di zaman Hayam Wuruk dengan perkembangan PKB (yang dipimpinnya), mengaitkan pemerintahan Mesir Kuno zaman Pharao/ Fir'aun dengan kejadian di pemerintahan Jepang di bawah PM Kaizumi dan soal otonomi daerah; mengaitkan kisah Jaka Tingkir dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/NGO); dsb.

Menurut *maraji'* pesantren, mempelajari sejarah antara lain agar orang dapat *i'tha-u kulli dzie haqqin haqqahu,* memberikan hak kepada pemiliknya; dengan kata lain membenarkan yang benar, memuji yang patut dipuji dan menyalahkan yang salah, mengecam yang patut dikecam untuk kemudian dijadikan pelajaran bagi memperbaiki sikap, dan amal. Agaknya, sehubungan dengan itu, Gus Dur, berusaha meluruskan dengan menawarkan kaca mata baru untuk melihat sejarah atau sekadar menyarankan agar, dalam melihat sejarah, kita tidak *a priori* terhadap salah satu tafsiran tanpa melakukan perbandingan, dengan, antara lain dia sendiri melemparkan alternatif-alternatif tafsiran atas beberapa kejadian sejarah. Dalam hal ini Gus Dur sering menggunakan sumber cerita lisan atau tutur. Gus Dur bahkan menganggap perlu adanya rekonstruksi kesejarahan yang konkret atas dasar cerita-cerita ilmu yang bercampur antara cerita

fiktif dan informasi aktual, khususnya bagi yang tak ada sumber tertulisnya. Tentu saja dalam melihat sejarah masa lalu, pesan untuk memetik pelajaran tak pernah dilupakan oleh Gus Dur. Pelajaran-pelajaran yang dipesankannya untuk kita petik juga yang disarankan di bagian-bagian tulisannya yang lain pun tidak jauh berbeda dari yang selama ini diserukannya, seperti bersikap objektif: bersikap, *tawazun*, seimbang, menjunjung tinggi kejujuran, tidak memandang sesuatu hanya dari satu sisi, tidak menggeneralisir, menghormati perbedaan, menghargai perempuan, dst. Pendek kata, pelajaran-pelajaran yang penting bagi mewujudkan kehidupan berdemokrasi khusus kepada para penulis sejarah, Gus Dur menekankan perlunya melengkapi sumber-sumber mereka dengan cerita cerita lisan, di samping sumber-sumber tertulis, untuk mana diperlukan kepekaan menangkap bahasa tutur dan kemampuan menguji kebenarannya; melakukan penafsiran secara tuntas dan tidak melakukan penafsir-an tunggal; serta mampu memisahkan fakta sejarah dari mistifikasi yang memang tak terhindarkan dalam sejarah panjang setiap bangsa. Yang menarik, Gus Dur juga mengingatkan pentingnya faktor kredibilitas dan kejujuran sejarawan dalam kehidupannya sehari-hari agar tafsiran dan spekulasinya dipercaya. "Dalam hal ini" tegasnya, "sejarawan yang secara resmi menjadi anggota partai politik, apalagi pengurusnya, sebaiknya tidak melakukan spekulasi apa pun, karena bagaimana-pun juga, kredibilitas semua partai di negeri ini belum-lah tinggi dan bahkan sering tidak dipercaya orang".

***

Di sini kita berpeluang untuk lebih mengenal pandangan-pandangan dan sikap Gus Dur mengenai banyak hal, termasuk harapan-harapannya, baik bagi kehidupan dunia maupun terutama bagi bangsa dan negaranya sendiri. Seperti barangkali sudah kita ketahui, Gus Dur begitu konsisten memegangi prinsip-prinsip, yang diyakini kebenarannya, seperti demokrasi, penegakan hukum, keberpihakan kepada rakyat, kejujuran dan keterbukaan, menjaga solidaritas bangsa, menghargai perbedaan, dsb. Dalam tulisan-tulisan di buku ini pun kita dapat membaca penegasannya atas itu semua.

Dan Gus Dur bukanlah Gus Dur bila dalam berbicara tidak menyelipkan kritik. Maka kita tak heran bila di sana-sini, dalam tulisan-tulisannya, kita temukan saja kritik-kritiknya yang tajam yang umumnya juga tidak melenceng dari prinsip-prinsip dasar yang diyakininya. Misalnya, dia dengan tajam terus mengkritik pemerintah: mengkritik politisi yang hipokrit dan mementingkan kepentingan sendiri atau kelompoknya, mengkritik pejabat-pejabat korup, mengkritik sikap keberagamaan yang terlalu formalitas, dan sudah barang pasti mengkritik MPR/DPR yang dianggapnya melanggar UUD 1945 dengan menyelenggarakan SI untuk melengserkannya kemarin. Melihat kritikan-kritikannya yang begitu tajam terhadap berbagai pihak dan hal, mungkin ada yang mengira Gus Dur mulai pesimis, tapi ternyata tidak. Gus Dur ternyata tidak pernah kehilangan optimismenya; satu dan lain hal karena dia begitu teguh memegang adagium kaidah

fiqh yang berbunyi: *maa la yudraku kulluh la yutraku julluh* (apa yang tak dapat dicapai seluruhnya, jangan ditinggal yang terpentingnya). Dengan pedoman ini, Gus Dur seperti tidak pernah kehilangan harapan. Bagaimanapun buruknya keadaan, toh tetap masih ada yang terpenting yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Justru karena inilah, saya kira, Gus Dur melancarkan kritikan-kritikannya. *Wa ba'du*, ketika membaca kolom-kolom Gus Dur, entah mengapa, saya jadi teringat pertemuan para 'Kiai Langitan', ketika 'fatwa' mereka ditunggu-tunggu waktu itu, dan beberapa kali bertemu dengan mereka yang ngotot hendak mencalonkan Gus Dur sebagai presiden. Pada awalnya, para kiai itu memutuskan dan sudah disepakati draftnya yang antara lain berbunyi "para kiai, pada umumnya warga NU, menghendaki agar Gus Dur tetap menjadi 'kiai bangsa' (saja)", dan kemudian—setelah Gus Dur bersikeras menuruti permintaan mereka yang mendorongnya untuk bersedia dicalonkan sebagai presiden—draft itu diubah menjadi: "meskipun para kiai dan umumnya warga NU menghendaki Gus Dur tetap menjadi 'kiai bangsa', apabila menurut ijtihad Gus Dur sendiri, ia bersedia dicalonkan sebagai presiden, para kiai dan umumnya warga NU, tidak menghalang-halangi."

Tapi, baiklah Anda baca sendiri saja. Mungkin Anda akan mendapatkan yang lain dan berpendapat lain. Selamat membaca!!!

Rembang, Juli 2002

Daftar Isi

Membaca Sejarah Lama (I)

Sejarah lama kita sebagai bangsa memang sangat menarik. Rasa tertarik itu timbul dari kenyataan bahwa yang tertulis sering tidak sama dengan yang terjadi. Dengan kata lain, sejarah masa lampau sering dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ini, umpamanya, terlihat pada kisah asal usul Dinasti Mataram.

Menurut cerita, Ki Ageng Gringging mempunyai sebutir kelapa muda yang diletakkan pada rak (*pogo*) di dapur. Ketika ia pergi ke kebun, datanglah Ki Ageng Pamanahan, yang lang-sung menuju dapur. Di tempat itu, ia melihat kelapa tersebut dan langsung melobanginya dan meminum airnya. Karena minum air kelapa itulah, kemudian, ia menjadi cikal bakal dinasti tersebut.

Padahal, dalam budaya Jawa, meminum air kelapa berarti serong dengan istri orang. Kalau hal ini benar, berarti dinasti tersebut adalah hasil hubungan gelap, antara Ki Ageng Pamanahan dengan istri Ki Ageng Gringging. Dan kalau demikian yang terjadi, berarti pula bahwa perzinaan adalah hal yang umum terjadi dalam pusat-pusat kekuasaan kita. Hal itu tidak

mengherankan, karena sampai sekarang pun hal itu masih terjadi.

ꕥ

Salah satu hal yang harus diteliti adalah hubungan antara. Raden Wijaya dan mertuanya, Raja Kertanegara dari Singosari. Mengapakah Raden Wijaya kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit di Tarik (Krian)? Dalam hal ini, sejarah mengatakan dia membelot dari mertuanya itu. Tapi, tidak diterangkan mengapa ia berbeda dengan sang mertua.

Dalam setiap sumber sejarah, selalu disebutkan bahwa ia mendirikan negara Majapahit dengan bantuan Angkatan Laut China yang mengirimkan perahu-perahunya melalui sungai Brantas ke Tarik. Padahal kita juga tahu bahwa Angkatan Laut China sepenuhnya diisi oleh orang-orang muslim. Karena itu, salahkah kita kalau lalu menyimpulkan bahwa pertentangan Raden Wijaya dan mertuanya karena perbedaan agama?

Kita tahu, bahwa Kertanegara adalah penganut paham *Bhairawa* (dalam istilah sekarang *Birawa*—yaitu, campuran antara agama Budha dan Hindu). Campuran itu adalah hasil pertempuran/pertemuan antara Kerajaan Hindu Kalingga di Jawa Tengah dan Kerajaan Syailendra yang beragama Budha. Dinasti Syailendra adalah pembangun candi Borobudur. Dari perbenturan Hindu dan Budha itu, lahirlah budaya campuran dengan agamanya sendiri, seperti tampak

pada Candi Prambanan, dekat Klaten. Ketika mereka dimusuhi kekuasaan yang ada (tidak jelas kaum Syailendra yang beragama Budha atau kaum Kalingga yang beragama Hindu) maka pengikut agama campuran itu berpindah ke Jawa Timur di bawah pimpinan Darmawangsa di Kediri.

Padahal kita tahu, Kerajaan Singosari adalah kelanjutan dari kekuasaan Jenggala dan Daha di Kediri. Jadi, tak heran apabila tradisi yang berkembang di Singosari adalah Hindu dan Budha.

Sangatlah menarik untuk melihat betapa perbedaan agama mendorong munculnya kerajaan-kerajaan baru. Tetapi juga, ambisi-ambisi politik pribadi dapat juga menyebabkan timbulnya kerajaan-kerajaan baru, seperti yang terjadi pada Kerajaan Daha dan Kerajaan Jenggala di Kediri. Dengan demikian, mau tidak mau kita lalu harus memilih antara dua versi sejarah. Versi perbedaan agamakah, atau versi pertentangan akibat ambisi ambisi pribadi? Dari sinilah kita lalu terjebak oleh keharusan membaca sejarah lama kita dalam versi yang berbeda-beda. Ini adalah akibat langsung akan kesenangan bangsa kita atas lambang-lambang kesejarahan. Catatan sejarah hampir-hampir tidak dibuat, dengan demikian kita lalu harus meraba-raba masa lampau kita sendiri. Inilah yang seharusnya kita lakukan, bukan lalu sekadar menghafalkan tahun-tahun dan nama-nama dalam "pelajaran" sejarah di sekolah-sekolah kita. Kita

bukannya mengingat-ingat tahun kejadian, melainkan memahami sejarah sebagai sebuah proses.

Jakarta, 27 Oktober 2001

Membaca Sejarah Lama (2)

Kita hampir selalu melihat perkembangan LSM/ NGO (Lembaga Swadaya Masyarakat/*Non Govermental Organization*) sebagai fenomena yang baru. Padahal kalau kita simak dengan teliti, sejarah masa lampau kita akan memperlihatkan asal usul LSM pada sejarah masa lampau kita sendiri. Dalam hal ini, kita dapat memulainya dengan kisah pertarungan antara Sultan Hadiwidjaya (Raden Mas Karebet atau Jaka Tingkir) di Pajang dan menantunya, Sutawidjaya.

Sutawidjaya kemudian terkenal dengan sebutan Panembahan Senopati Ing Alaga Sayyidin Panatagama, pendiri Dinasti Mataram yang kita kenal sekarang. Pertempuran keduanya, di Pajang, akhirnya dimenangkan oleh Sutawidjaya. Dengan demikian, Sultan Hadiwidjaya harus mencari "modal baru" dalam pertarungan itu. Dan untuk itu, ia kembali ke rumah ibunya, Asta Tinggi, Sumenep (Madura).

Sebagai penganut tarekat Qodiriyyah, ia kemudian memperoleh 40 macam *kanuragan* (kesaktian) baru. Dalam perjalanan kembali ke Pajang, ia menaiki perahu yang melaju di atas Sungai Solo. Hal ini, sebagaimana dilanggengkan dalam tembang Jawa

"*Sigra milir, sanggethek sinangga bajul, kawandasa cacahipun*". Tembang ini adalah manifestasi budaya Jawa, yang dikenal hampir oleh setiap anak Jawa yang mengenal budaya daerahnya.

ઘ

Kisah Jaka Tingkir di atas, "diakhiri" oleh kisah ketika ia mampir di Pulau Pringgobayan. Kini, pulau itu bertaut dengan daratan yang menjadi jembatan yang menghubungkan antara Pucukrejo dan Paciran di Kabupaten Lamongan. Di tempat itulah, Jaka Tingkir singgah untuk mengisi air dan keperluan-keperluan lain, dalam perjalanan kembali dari Pulau Madura ke Pajang dekat Demak.

Dalam persinggahan itu, ia tertidur dan *vision* (*rukyah*, impian atau *wangsit*) yang dialaminya terjadi. Gurunya menyatakan hendaknya ia tak meneruskan perjalanan ke Pajang, tapi tetap tinggal di pulau tersebut. Untuk apa ia kembali ke Pajang, jika hanya untuk menuntut balas kepada Sutawidjaya?

Padahal, kanuragan yang dimilikinya tidak untuk merebut takhta kerajaan dari menantunya. Kalau hal itu dilakukan, ia hanya akan menjadi korban nafsu kekuasaan belaka. Dengan sendirinya, ia harus menahan diri dan mengembangkan sesuatu yang baru, yang harus dilakukannya tidak dari pusat kekuasaan di Pajang, tetapi dari tempat ia berada, yaitu di Pringgobayan.

Dengan demikian, lahirlah sebuah tradisi baru, yaitu adanya LSM di luar pusat kekuasaan Pajang. Ini

adalah apa yang dirumuskan oleh Dr. Taufik Abdullah dengan istilah hubungan multi-kratonik. Dalam hubungan seperti ini, selama "kraton kecil" menyatakan ketundukan nominal kepada "kraton besar" sudah dianggap cukup. Bahwa pihak periperal mengembangkan diri dalam pola yang tidak dikehendaki oleh pusat kekuasaan, adalah sesuatu yang baru dalam sejarah bangsa kita.

Hubungan periperal—pusat yang tidak simetris ini justru dipergunakan untuk pengembangan Islam tanpa merugikan agama Hindu dan Budha yang sedang berkuasa saat itu. Sedikit demi sedikit, agama baru yang datang kemudian mengambil alih kehidupan agama-agama terdahulu, tanpa menimbulkan perbenturan yang berarti. Dengan cara ini, sesuatu yang baru telah menggantikan hal lama tanpa ada perbenturan politik yang dahsyat.

Ini berarti, LSM yang bergerak di akar rumput (*grass roots*) harus mengembangkan jati dirinya sendiri, hingga tidak harus mengikuti pola LSM-LSM internasional, kalau dikehendaki tidak ada perbenturan besar melawan sistem kekuasaan yang ada. Ini berarti keharusan bagi mereka untuk tidak bergantung pada dunia luar, tetapi menggunakan cara dan gaya hidup masing-masing yang benar-benar berasal dari rakyat. Di sisi inilah kita berharap banyak dari LSM-LSM kita, bukannya sesuatu yang didiktekan dari luar.

Singapore, 7 Nopember 2001

Membaca Sejarah Lama (3)

Jepang menduduki Hindia-Belanda, demikian kawasan Indonesia waktu itu dikenal, pada bulan Maret 1942. Kiai Hasyim Asy'ari dari Tebuireng di Jombang menolak mem-bungkukkan badan (*seikeirei*) ke arah timur laut tempat Kaisar (*Tenno Heika*) bersemayam di Tokyo. Bagi beliau, ini merupakan penyerahan diri kepada keyakinan bahwa Kaisar Jepang adalah putera Dewa Matahari (*Amaterasu*).

Polisi rahasia Jepang (*kenpeitei*) marah atas pembangkangan ini, dan beliau pun dimasukkan penjara Kahsosok Surabaya. Delapan bulan lamanya beliau ada di situ, dengan penyiksaan dan tindakan keji lainnya. Sebagai akibat, beliau tidak dapat meng-gerakkan tangan kirinya, alias lumpuh. Pemerintah pendudukan Jepang baru belakangan mengetahui betapa besar pengaruh beliau, dan segera dibebaskan setelah delapan bulan berada di penjara.

Perlawanan dalam bentuk berdiam diri menahan siksaan ini, bagaimana pun juga telah memberikan bekasnya dalam sejarah. Paling tidak, sikap tidak rela itu segera diketahui masyarakat banyak, dan memang inilah inti dari perlawanan kultural, bukan perlawanan

militer. Sengaja tidak diambil pilihan perlawanan secara militer karena waktunya dipandang belum tepat, dan kita tidak siap untuk itu.

ଔ

Putera beliau yang bernama Abdul Wahid Hasyim memimpin Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) pada tahun itu juga di Jakarta. Tinggal di Jalan Diponegoro, kiai muda ini diminta mewakili ayahnya oleh pihak Jepang untuk membuka *Shumubu* (Kantor Urusan Agama)—yang di kemudian hari berkembang menjadi Departemen Agama. Dalam kapasitas itulah, pada suatu hari, ia dihubungi oleh Laksamana Maeda dari pemerintahan pendudukan Jepang. Ia ditanyai, siapa yang patut diperlakukan selaku wakil bangsa Indonesia? Ia menjawab, hal itu akan diketahui setelah ia berkonsultasi dengan ayahnya di Jombang, yaitu KH. Hasyim Asy'ari, di Tebuireng.

Dalam pembicaraan melalui telepon dengan sang ayahanda di Tebuireng, Jombang, ia mendapatkan jawaban. Bahwa orang yang pantas didukung sebagai pemimpin bangsa Indonesia adalah Soekarno. Sebagai pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan kiai yang sangat disegani serta punya pengaruh luas, pilihan ini tentu mengandung tempat yang sangat terhormat bagi diri Bung Karno.

Dengan demikian, pemerintahan pendudukan Jepang menunjuk Soekarno sebagai pemimpin rakyat beserta Mohammad Hatta. Dilihat dari sepak terjang

dan sikap tersebut, kedudukan dua tokoh itu sebagai pemimpin bangsa adalah sesuatu yang sangat jelas. Apabila keduanya sepakat tentang sesuatu hal, boleh dikata hal itu telah menjadi keputusan bangsa ini. Demikianlah kesepakatan mereka untuk merdeka, akhirnya tertuang dalam teks proklamasi kemerdekaan bangsa kita pada 17 Agustus 1945. Bagi mereka, tidaklah begitu penting dengan melihat apa yang mereka lakukan saat itu—karena memang dipaksa oleh para pemuda, seperti Soekarno.

Dalam "membaca" kejadian itu, kita harus menyadari, bahwa para pemimpin kita dahulu sepakat untuk merdeka, sedangkan mengenai hal-hal lain akan ditetapkan kemudian. Jadi memang terasa betapa penting sikap yang diambil bersama-sama oleh para elite bangsa kita di masa itu. Tanpa adanya sikap seperti ini, kita mungkin kini belum merdeka, hingga hari ini.

Sayangnya, hal ini tidak tampak di kalangan para elite kita pada masa sekarang. Masing-masing mencari pemenuhan ambisi pribadi, dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Yakni, kepentingan nasional yang selalu dikalahkan oleh ambisi pribadi dan kepentingan kelompok. Ini semua ternyata membawa sebuah akibat lain, yaitu suatu pertentangan tajam di antara mereka. Masing-masing ingin tampil sebagai pemimpin bangsa, dan boleh dikata tidak mengakui secara tulus kepemimpinan orang lain. Dikombinasikan dengan kepandaian membungkus

semua kekurangan—dengan retorika indah yang tak berpengaruh apa-apa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, sikap tersebut membawa kita pada kemacetan kehidupan yang kita alami sekarang ini.

Jalan satu-satunya untuk mendobraknya adalah dengan cara meninggalkan sikap seperti di atas. Sudah waktunya kita memikirkan nasib bangsa ini secara keseluruhan. Kalau perlu dengan menanggalkan sikap memandang penting arti diri sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beban hutang luar negeri kita yang sudah mencapai 700 milyar dollar AS dan ancaman disintegrasi—akibat matinya Theis Hiyo Eluay di tanah Papua dan masalah pembunuhan atas seorang Letnan Dua TNI di Aceh oleh pihak GAM, jelas membuktikan adanya kebutuhan sikap mementingkan bangsa ini. Pertanyaan dasarnya adalah, sanggupkah kita sebagai bangsa mengembangkan sikap meninggikan kepentingan bersama itu dan mengalahkan kepentingan pribadi para pemimpin bangsa kita?

Jakarta, 20 November 2001

Membaca Sejarah Lama (4)

Sultan Agung Hanyokro Kusumo adalah tokoh sejarah yang sangat menarik. Di satu pihak, ia menggambarkan seorang penguasa yang mempersatukan seluruh bangsa kita di bawah sebuah sistem kekuasaan yang membawakan kesejahteraan bagi para warganya. Sementara di sisi lain, ia menggambarkan seorang penguasa yang dikungkung oleh tradisinya sendiri dan didera oleh sistem yang ditegakkannya. Uraian selanjutnya akan menjelaskan tokoh sejarah yang patut kita kagumi.

Sebagai penguasa Jawa yang menegakkan sistem agraris, dapat dimengerti jika ia kemudian menghancurkan pusat-pusat kelautan (maritim kita), seperti Jepara, Tuban, dan Surabaya. Sistem keningratan yang ditegakkannya menghasilkan para *abdi dalem* (pejabat kraton) yang hanya mementingkan kelas atas yang berkuasa belaka. Aspirasi rakyat dan kekuatan-kekuatan rakyat lainnya, sama sekali tidak mendapatkan perhatian. Karena itu, cerita yang sampai ke tangan kita hanyalah mengenai intrik-intrik kraton belaka.

Cerita tentang Ki Ageng Mangir adalah salah satu di antaranya. Bagaimana ia mengatur agar puteri tertua-

nya, Ratu Pembayun, kawin dengan tokoh itu dan bagaimana kemudian ia membunuh sang menantu dan menguburkan mayatnya separo di dalam pekarangan kraton (karena menantu Raja) dan separuh di luar pagar kraton (karena ia adalah pemberontak), merupakan cerita yang mengasyikkan. Perlakuannya terhadap Ki Ageng Mangir itu adalah sesuatu yang mengikuti standar kraton Jawa, dan tidak ada hubungannya dengan aspirasi rakyat.

ꟹ

Kisah penyerangannya atas Jakarta (saat itu bernama Batavia) adalah pelajaran sejarah yang sangat menarik. Dia menempati kawasan sebelah timur Sungai Ciliwung, dengan menduduki wilayah Salemba. Paseban (tempat ia menerima *sebo* atau orang-orang yang menghadap dan menyembahnya) didampingi oleh pusat Tentara Jawa Mataram (sekarang bernama Matraman) dan Tentara Bali Mataram (sekarang Bali Matraman) ditambah lagi dengan kawasan bala tentara panglimanya (Wiragunan, sekarang bernama Ragunan) adalah bukti adanya penyerbuan tersebut.

Namun, ia gagal merebut Batavia dari tangan Belanda, yang menggunakan Sungai Ancol, Sungai Kalimalang dari arah pasar Rumput ke barat dan Sungai Cideng hingga ke tepi laut teluk Jakarta sebagai alat pertahanan alami untuk menghadapi raja Jawa tersebut. Sultan Agung tidak dapat menyeberangkan pasukannya melintasi ketiga sungai tersebut, karena pihak Belanda menyediakan pasukan-pasukan yang

menggunakan panah api di kebon-kebon seberang sungai, seperti kebon melati, kebon kacang, kebon sayur, dan sebagainya. Itu pun masih ada kebon sirih yang melapisi pertahanan tersebut dengan keluarga-keluarga Belanda tinggal di daerah Gambir (*Weltevreden*), dengan aman.

Belanda mengorganisir kekuatannya secara efisien, menggunakan Sungai Ciliwung dari Pasar Baru ke barat dan berbelok ke utara menuju Glodok, yang dipenuhi orang-orang China. Jadi, Gambir sebagai pusat pemerintahan, sedangkan Glodok sebagai pusat perdagangan yang aman dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya tanpa gangguan apa pun dari raja Jawa itu. Kecenderungan besar Sultan Agung untuk menumpukan kekuasaan pada sektor agraris, membuat ia buta akan pentingnya kekuatan maritim untuk menyerbu kota tersebut dari laut. Jika hal ini ia lakukan, tentu tidak semudah itu Belanda dapat mempertahankan kota di atas. Dan, sejarah kita sebagai bangsa tentu akan berbeda pula jalannya.

Keterbatasan Sultan Agung sangat tampak di sini. Tapi, kelebihannya dalam menerapkan sistem pemerintahan agraris, juga membuahkan hasil-hasilnya sendiri. Di sinilah terletak jasa-jasa Sultan Agung, di samping dalam penerapan hukum Islam dan penyesuaiannya (paralelisme) atas kalender Jawa (yang dimulai oleh Prabu Ajisaka di Jawa Timur) terhadap kalender Islam (dimulai dengan bulan Muharam) yang merupakan sebuah warisan budaya

yang sangat berharga bagi kita. Dalam hal ini, dapat ditambahkan bahwa keputusannya untuk menerapkan hukum perkawinan, perceraian, dan waris Islam sebagai pelaksanaan terbatas syari'at Islam sebagai sesuatu yang hingga saat ini pun masih dilakukan oleh bangsa kita. Ternyata Islam tidak perlu dilaksanakan secara ideologis, tetapi secara kultural, dan ini adalah jasa terbesar Sultan Agung Hanyokro Kusumo.

Jakarta-Semarang, 22 Nopember 2001

Membaca Sejarah Lama (5)

Sebuah pertempuran dengan berbagai penafsiran. Yang dimaksudkan adalah Perang Bubad yang terjadi antara Kerajaan Sunda di Jawa Barat, melawan Majapahit di kawasan mereka sendiri. Hal itu berlangsung ketika rombongan Tentara Sunda itu berada dalam perjalanan dari Sunda ke Kraton Majapahit. Saat itu, pasukan Hayam Wuruk menyerang rombongan pengantin puteri Sunda yang sedianya akan menjadi permaisurinya.

Penyerangan itu jelaslah justru bukan direncanakan oleh Hayam Wuruk sendiri, tetapi oleh orang-orang yang tak senang jika perkawinan tersebut berlangsung. Jika hal itu terjadi maka Majapahit akan menjadi sangat perkasa dan memiliki kawasan asal (*original size*) yang sangat luas. Dalam hal ini, pertimbangan-pertimbangan geo-politik tidak memperkenankan penyatuan wilayah Majapahit dan Padjajaran, karena itu perlu direkayasa terjadinya sebuah peperangan. Dengan demikian, kedua negara yang sedang tumbuh pesat itu tidak dapat menyatukan energi hingga menjadi kuat dan tak terlawan.

Cerita di atas itu adalah cerita klasik tentang menyatunya dua kekuatan dan upaya penggagalan penyatuan dua kekuatan tersebut. Majapahit adalah kulminasi perpaduan antara Budhisme dan Hinduisme, terkenal dengan nama *Bhairawa*. Jelas dengan uraian ini, datangnya perlawanan adalah dari pihak "Hindu murni", yang tidak rela jika gagasan penyatuan wilayah Majapahit dan Pasundan—melalui perkawinan Hayam Wuruk dan puteri Sunda—itu karena akan memperluas wilayah *Bhairawa* tersebut.

ଔ

Pada setiap zaman selalu ada yang menolak perpaduan apa pun, dengan alasan hilangnya "kemurnian" suatu ajaran yang menjadi tulang punggung masyarakat. Analoginya saat ini adalah muncul elemen-elemen "NU murni" dalam perkembangan PKB. Dalam upaya mempertahankan supremasi NU dalam partai tersebut, mereka tidak mau menerima kebutuhan akan "keterbukaan" PKB bagi semua unsur Islam di satu pihak serta unsur Islam dan non-Islam di pihak lain. Padahal kalau ia ingin besar, PKB haruslah membebaskan diri dari kungkungan tersebut.

Yang terpenting adalah, penyatuan kedua masyarakat tersebut. Tapi, hal itu merupakan ancaman bagi pikiran-pikiran politik yang ada. Kalau dikaji secara mendalam, sejarah memang selalu berkisar antara perluasan wilayah melalui penyatuan berbagai elemen di satu pihak, dan pandangan lawan di pihak lain. Di masa modern ini pun, hal yang sama juga terjadi

antara Sutan Takdir Ali Syahbana dan Sanusi Pane. Ali Syahbana yang membawakan modernitas dan Pane yang membawakan tradisi, berlawanan pikiran dan pendirian dalam Pujangga Baru.

Bahwa sebuah pertarungan biasanya dimenangkan oleh pihak yang menghendaki perluasan pemikiran dan perbuatan, ini tidak berarti mengalahnya dengan mudah kelompok di atas, karena kelompok "murni" tersebut. Karena itu, orang tidak perlu heran, jika upaya penyatuan kedua kerajaan itu lalu dihambat oleh kecenderungan bergabung menjadi aktualitas berperang. Dengan demikian, kekuatan Majapahit tidak menjadi besar lagi.

Tafsiran sejarah di atas memang dapat dibenarkan kalau diingat bahwa kemungkinan Majapahit yang menyatukan dua pandangan keagamaan Hindu dan Budha dapat diperhitungkan sebagai ancaman terhadap "kemurnian ajaran". Apalagi kalau diingat, Majapahit juga telah menancapkan pengaruhnya di Sumatra Barat dan kawasan-kawasan lain, seperti terlihat dari gelar Adityawarman di daerah tersebut. Sudut pandang lain dapat dikemukakan. Ada sangkaan bahwa Prabu Jaya Baya di Pamenang, Raden Wijaya (pendiri Majapahit), Brawijaya IV, dan Brawijaya V adalah orang-orang yang telah menjadi muslim. Apabila hal ini benar maka ada penafsiran sejarah bahwa orang-orang muslim itulah yang merekayasa Perang Bubad. Mereka tidak menghendaki penguatan Hinduisme, yang juga berarti penguatan ajaran-ajaran *Bhirawa* dalam ke-

hidupan masyarakat di Majapahit. Perang Bubad, dalam pandangan ini adalah permainan geo-politik untuk menjamin Islamisasi masyarakat Jawa.

Kalau penafsiran terakhir dapat dibenarkan maka dapat pula dimengerti mengapa raja-raja Hindu di Jawa pada waktu itu berdiam diri saja. Sebagai penguasa formal, tentu saja harus mendiamkan upaya-upaya Hinduisme. Ini menunjukkan kepiawaian politik mereka, di samping kelihaian kaum muslimin yang merupakan minoritas di zaman Hayam Wuruk untuk memainkan kartu kesejarahan mereka. Manakah yang benar antara dua penafsiran di atas *wallahu a'lam bi ash-shawab*, hanya Allah-lah yang mengetahui segala tentang sesuatu hal.

Jombang, 28 Nopember 2001.

Membaca Sejarah Lama (6)

Dalam buku-buku sejarah selalu dikemukakan, pendiri Majapahit adalah Raden Wijaya. Ia adalah menantu Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Bahwa ia mendirikan kerajaan baru dekat Desa Tarik (sekitar Krian, sekarang) adalah kenyataan sejarah yang tak terbantahkan. Begitulah kata buku-buku sejarah, yang berdasarkan literatur agung seperti *Negara Kertagama* dan sebagainya.

Penafsiran pertama atas kejadian ini menunjuk pada ambisi politik pribadi dari Raden Wijaya, karena dia tidak mungkin akan menjadi raja di Singosari. Lalu ia pun akhirnya mendirikan Kerajaan Majapahit untuk memenuhi ambisi politik pribadinya tersebut. Hal ini sesuai dengan keputusan MPR RI untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa guna memenuhi ambisi politik pribadi masing-masing—bahkan, kalau perlu dengan melanggar UUD.

Sebuah penafsiran lain menunjuk pada kenyataan yang berbeda. Bahwa untuk mendirikan kerajaan baru itu, Raden Wijaya haruslah dibantu Angkatan Laut China yang saat itu menguasai laut Jawa. Mereka adalah pelaut-pelaut muslim dan mustahil mereka

mau membantu Raden Wijaya meriskir kemarahan Kerajaan Singosari, jika bahkan karena alasan agama yang mendorong mereka untuk melakukan hal itu. Yaitu, bahwa Raden Wijaya adalah juga seorang muslim. Memang tak ada prasasti yang membuktikan hal ini, tapi pertimbangan-pertimbangan akal mendorong kita ke arah pe-nafsiran tersebut.

❧

Jika penafsiran di atas dapat dianggap benar, jelas bahwa di masa itu telah ada masyarakat muslim di kawasan utara Pulau Jawa. Ini bersesuaian sepenuhnya dengan apa yang diuraikan R. Boechori, kepala dinas purbakala kita dalam *An Introduction to Indonesian Historiography* dengan editor Sudjatmoko. Menurut Boechori, dalam abad ke-10 telah ada komunitas muslim di Gresik, tak jauh dari Desa Tarik. Masyarakat itu didirikan oleh Fatimah binti Maimun di Desa Leran, dekat Gresik. Mustahil dalam masa tiga abad tidak ada perkembangan Islam sama sekali. Apalagi dalam kitab *Al-Kawakib al-Lammaah* juga disebutkan bahwa ada Sayyid Jamaluddin Husain, kakek dari Sunan Ampel, yang sekurun dengan masa sekitar hidupnya Gadjah Mada. Tentu, Sayyid Jamaluddin Husain ini—pembangun surau yang kemudian didampingi Klentheng di Gunung Kawi—adalah pejuang yang menginginkan tegaknya masyarakat Islam di tanah Jawa.

Berarti, waktu itu telah ada masyarakat minoritas Islam di tengah-tengah mayoritas masyarakat Hindu-

Budha (*Bhairawa*). Ini berarti, telah merasuknya masyarakat baru yang mendambakan kemajuan negeri dan perkembangan teknologi, di tengah-tengah kesibukan para raja Majapahit untuk memperluas kekuasaan mereka melalui peperangan. Jadi pantas jika masyarakat muslim yang menjadi alternatif itu tampak menarik bagi masyarakat Majapahit pada saat itu.

Jadi, dugaan bahwa orang banyak bosan dengan sikap raja-raja Singosari dan beberapa raja Majapahit, serta mencari alternatif dengan menyelusupnya sejumlah kaum muslimin ke dalam istana Majapahit merupakan sebuah hipotesis yang dapat dipertanggungjawabkan secara historis. Apalagi kalau hal ini dihubungkan dengan bantuan Angkatan Laut China yang beragama Islam yang menguasai perairan antara Madagaskar, dekat benua Afrika, dan Ascension (Pulau Tahiti) yang terletak di kawasan Pasifik.

❧

Dalam karya *1492* (*Quatroze Neuf-Deux*) disebutkan bahwa Angkatan Laut China yang beroperasi itu adalah kekuatan muslim, tentu mereka turut campur dalam persoalan-persoalan politik lokal. Baru dalam abad berikutnya, ketika seorang menteri peperangan China menjadi salah seorang Mangkubumi (*regent*), Angkatan Laut ini dipanggil pulang ke tepian daratan China. Di kawasan itu, keseluruhan kapal laut tersebut dibakar habis, karena sang menteri—yang adalah seorang Konfucius fundamentalis—merasa

takut jika masyarakat Tionghoa di tanah rantau itu akan menumpuk kekayaan.

Dengan begitu, mereka dapat membeli tanah di daratan Tiongkok dan menjadikan seluruh negeri beragama Islam. Masyarakat Tionghoa muslim di pulau-pulau Nusantara, terutama di Jawa, akhirnya kehilangan kontak dengan daratan China dan segera mereka diserap oleh 'masyarakat pribumi' dan dengan sendirinya hilang ke-China-an mereka. Jika penafsiran ini benar maka pergumulan yang terjadi antara masyarakat muslim dan *Bhirawa* di Majapahit dalam abad ke-14 itu tentu berjalan sangat menarik.

Sebuah andaian lain juga menjadi sesuatu yang sangat menarik. Jika Raden Wijaya adalah seorang muslim, apakah ia tidak berasal dari keturunan Tionghoa, alias dari kaum Peranakan? Jika benar, nama Wijaya tentu menunjukkan marga yang dimilikinya, yaitu marga Oey atau Wie, yang dalam cabangannya juga disebut Wong atau Wang. Dan jika ini benar, tentu sangat menarik bahwa raja-raja terkemuka selalu menggunakan gelar Brawijaya (raja-raja Wijaya). Ini tentu sejalan dengan nenek moyang penulis yang berasal dari marga Tan (bahasa Mandarin: Chen). Menarik bukan?

Jombang, 28 Nopember 2001

Membaca Sejarah Lama (7)

Gambaran yang jelas dari dua kelompok minoritas bangsa kita sangatlah menarik untuk dibahas di sini. Keduanya adalah golongan keturunan Arab dan Tionghoa. Masa lampau kedua golongan tersebut membawakan pelajaran yang berharga bagi kita sebagai bangsa, untuk selanjutnya diambil sebagai pelajaran bagi masa depan kita.

Kesatuan kita sebagai bangsa, bukanlah sesuatu yang tumbuh begitu saja, melainkan merupakan pangalaman demi pengalaman yang kita alami sebagai bangsa di masa lampau. Kalau Bung Karno bertanya apa *raison d'etre*—meminjam istilah Ernest Renan—alasan berdirnya sebuah bangsa maka itu berarti akumulasi pengalaman ratusan tahun yang dialami bangsa itu dalam membentuk sebuah negara yang kuat. Jadi, bukanlah pengalaman sesaat di saat Renan atau Soekarno menyatakan hal itu saja, tetapi fakta demi fakta yang akhirnya membentuk sejarah bangsa tersebut.

Untuk bangsa kita, hal itu harus dicari tidak cukup pada abad pertama Masehi, ketika Prabu Ajisaka memperkenalkan tulisan dan memulai hitungan tahun

Saka saja, tetapi juga harus dicari hal-hal, seperti dimulainya gerakan Oikumene di Barus pada abad ke-4 Masehi, ketika rombongan gereja Syiria sampai ke sana. Mungkin juga, *raison d'etre* Indonesia pada kenyataan antropologis yang memperlihatkan adanya ras Melayu di Indonesia bagian barat dan ras Austro-Melanesia di bagian timur.

ଔ

Dalam hal ini, golongan keturunan Tionghoa di masa lampau dapat dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama adalah ketika Angkatan Laut Tiongkok menguasai samudera Hindia dari kepulauan Madagaskar hingga ke lautan Pasifik di Pulau Tahiti. Pada abad ke-13 sampai dengan ke-16, Angkatan Laut ini dikuasai oleh para perwira yang beragama Islam, seperti Laksamana Ma Chengho (*Ma Zenghe*). Laksamana pendiri Singapura ini melakukan ekspedisi tujuh kali ke perairan kita dan meninggal dunia di pantai timur Hindia (Kalikut).

Angkatan Laut China muslim inilah yang—menurut perkiraan penulis membantu Raden Wijaya (dari Marga Oey atau Wie?)—mendirikan Kerajaan Majapahit. Mungkinkah Desa Tarik di kawasan Man yang didirikannya itu berasal dari kata 77 tariqoh, yang berarti sekte tasawuf (di negeri ini lebih dikenal dengan nama tarekat)? Bahwa ia bertentangan dengan mertuanya, Kertanegara, dari Singosari hanya karena ambisi politik pribadi, bukan karena perbedaan agama, sejarahlah nanti yang akan menjawabnya.

Bagian kedua terjadi ketika orang-orang muslim China itu ditinggalkan oleh perahu dan kapal-kapal laut mereka dibakar di pantai daratan China. Lalu, mereka menjadi pribumi di kawasan rantau ini. Orang-orang Belanda yang kemudian mendatangkan orang-orang China yang beragama Budha dan Konghuchu dari Pulau Hainan dan daratan Tiongkok, dengan tidak sadar telah menciptakan golongan keturunan Tionghoa baru.

Sementara itu, orang-orang Arab telah datang ke sini sejak masa dini, seperti dikisahkan Sulaiman asy-Syairafi (dalam kisah-kisah perjalanannya), ketika orang-orang Belanda masuk ke mari, mereka menerapkan kewajiban membayar uang (*fiscal duty*) bagi orang Arab yang akan bepergian ke luar kota besar. Dengan demikian, orang-orang Arab itu mempribumikan diri dan hal itu dapat dilakukan dengan mudah karena mereka beragama Islam. Demikianlah kita mengenal Pangeran Diponegoro, KH. Hasyim Asy'ari, dan sebagainya, sebagai orang pribumi dan bukan orang-orang keturunan Arab.

Gelombang kedua terjadi ketika pemerintahan Hindia-Belanda mencabut kewajiban fiskal tersebut, dan memperkenankan orang-orang keturunan Arab itu menggunakan nama-nama marga (*'asyirah'*) mereka. Karena mereka dari golongan sayyid (baik habib maupun lainnya) dengan segera tampillah nama-nama seperti al-Habsyi, as-Sagaf, al-Gaderie, ash-Shihab,

dan seterusnya. Mereka inilah yang dinamakan orang-orang Arab, sedangkan kelompok pertama tadi tidak dianggap orang Arab, seperti halnya penulis kolom ini, yang sebenarnya berasal dari marga al-Basyaiban.

Kelompok ketiga adalah golongan keturunan Arab yang muncul ketika pintu dibuka lebar-lebar untuk semua orang Arab masuk ke kawasan ini. Datanglah orang-orang keturunan Arab non-sayyid, seperti Bawazier, al-Katiri, Baswedan, serta Makarim. Mereka adalah orang Arab biasa yang muncul dari lingkungan profesi mereka. Bukankah dari perkembangan kedua golongan keturunan tersebut dapat disimpulkan pentingnya arti hilangnya perbatasan? Bukankah ini berarti kita bersatu sebagai bangsa ini karena tinggal dan hidup di tempat yang sama, bukan karena keturunan kita?

Kramat Raya, 30 Nopember 2001

Membaca Sejarah Lama (8)

Perkembangan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, memperlihatkan sesuatu yang sangat menarik. jika dikaji dengan teliti bahasa ini dinyatakan sebagai bahasa nasional kita oleh Kongres Pemuda tahun 1928. Sekarang ia telah menjadi alat pemersatu kita sebagai bangsa dan menjadi alat komunikasi yang efektif di kawasan ini, di saat bahasa Inggris menjadi sebuah alat komunikasi internasional—yang mau tak mau harus kita kuasai juga.

Perkembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional menjadi sangat menarik untuk dikaji, ketika kita tahu bahwa bahasa Inggris telah berkembang menjadi sesuatu yang bersifat internasional. Kalau bahasa-bahasa Eropa mengembangkan diri masing-masing sebagai bahasa nasional dengan segala kesempitan masing-masing bangsa, dan bahasa Inggris menjadi alat komunikasi internasional yang terbuka luas maka bahasa Indonesia telah berkembang menjadi bahasa nasional yang luas.

Kalau bahasa Inggris berkembang dengan keragaman yang tinggi (*pidgin Englishes*) dan bahasa nasional masing-masing—di Eropa Barat menunjuk-

kan kecenderungan yang monoton sebagai salah satu bentuk formalisasi—maka bahasa nasional yang terbuka. Di samping bahasa nasional sebagai unsur pemersatu bangsa, kita kenal juga sistem kepegawaian yang satu bagi seluruh kawasan bangsa dan pola pembangunan daerah yang saling bergantung satu sama lain, maka bahasa Indonesia menjadi alat perekat bagi semua suku bangsa yang ada di negeri ini.

☙

Bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu. Tetapi, berbeda dari bahasa Malaysia, bahasa Tagalog di Filipina, dan bahasa Patani di Thailand Selatan, maka bahasa Melayu di negeri ini berkembang menjadi bahasa nasional yang mempersatukan kita sebagai bangsa. Kalau yang lain mengembangkan diri dengan jalan memenangkannya atas bahasa-bahasa daerah dan di kawasan masing-masing, maka bahasa Indonesia justru berkembang dengan menyerap unsur daerah yang saling berbeda, seperti kata "mantan"—yang berasal dari bahasa Sunda dan Madura, menjadi istilah nasional untuk menggantikan kata "bekas".

Di sinilah terletak perkembangan yang sangat menarik itu. Sir Winston Churchill memenangkan hadiah Nobel untuk sastra, antara lain karena ia membuat istilah *english speaking people*, untuk menunjuk aneka ragam bangsa yang menggunakan bahasa internasional tersebut. Kita justru memperkenankan berbagai suku bangsa mengembangkan bahasa nasional yang satu dengan berbagai keragaman bentuk. Kalau

ada *english-speaking peoples in the whole worlds*, meminjam istilah Churchill, kita justru memperkenankan suku-suku bangsa kita mengembangkan bahasa nasional yang satu, tapi berbentuk dan berbunyi lain-lain (*pidgin Indonesian*).

Kelenturan diri seperti inilah yang menjadikan bahasa nasional kita mampu berkembang dengan pesat, digunakan oleh jumlah yang sangat besar, yaitu hampir 210 juta jiwa. Kalau ini kita lihat sebagai keanekaragaman yang membuktikan kelenturan dan sekaligus kesatuan kita sebagai bangsa, kita dapat mengerti mengapa bahasa ini dapat berkembang menjadi alat komunikasi yang canggih. Kata "canggih" itu sendiri menunjukkan kelenturan bahasa Indonesia untuk menyerap budaya setempat (dalam hal ini budaya Jawa).

ଓ

Bahasa Indonesia mulai tumbuh ketika Raja Ali Haji di Riau membuat standarnya sendiri atas bahasa Melayu yang di-pakai di kawasan pemerintahannya di Riau pada 2—3 abad yang lalu. Standarisasi yang dilakukannya itu memenangkan versi yang dimilikinya untuk berkembang menjadi bahasa umum (*lingua franca*) yang segera diambil alih oleh dunia perdagangan dan komunikasi di kawasan tersebut. Segera pula ia berkembang menjadi bahasa administrasi kita sebagai bangsa. Keputusan Kongres Pemuda tahun 1928 untuk menjadikannya sebagai bahasa nasional

hanyalah menjadi langkah formalisasi atas kenyataan yang ada.

Segera para sastrawan kita mengambil alih standarisasi itu dan menggunakan dalam karya-karya mereka. Siti Nurbaya dari Marah Rusli dalam tahun belasan, Salah Asuhan dari Abdul Muis menjelang Perang Dunia II, dan novel-novel Marga T dalam dasawarsa 80-an, menunjukkan standar yang sama dalam penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Ini menunjukkan mantapnya perkembangan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Dilihat dari sudut pandangan historis dan antropologis, hal itu sangat menakjubkan kalau dibandingkan dengan berbagai bangsa besar yang tidak mampu membuat bahasa nasional mereka. Terpaksalah mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa Nasional. Ada keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari proses itu, tetapi kerugiannya juga tidak sedikit.

Karena itu, kita patut berbangga dengan bahasa nasional kita, karena sewaktu penulis menjadi presiden menyatakan dalam pidato—dalam penerimaan gelar *Doktor Honoris Causa* di muka *Asian Institute of Technology* di Bangkok—bahwa perkembangan teknologi informasi (IT, *Information Technology*) di negeri ini haruslah menggunakan bahasa nasional karena hanya ada sekitar sepuluh sampai dua puluh juta manusia akan mampu berkomunikasi dalam bahasa internasional Inggris. Mengapa kita berkeras menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa teknologi informasi kita

di masa mendatang? Bukankah dengan berkeras pada bahasa Indonesia sebagai bahasa "teknologi informasi" kita di masa mendatang, kita akan dapat membuat bagian terbesar bangsa kita berbahasa "IT"?

Kramat Raya, 30 Nopember 2001.

Membaca Sejarah Lama (9)

Kerajaan Banten lama merupakan lahan menarik bagi sebuah kajian mendalam. Di satu sisi, Banten telah memiliki Dubes di Eropa Barat (Inggris) pada abad ke-17. Ia benar-benar menjadi pusat perdagangan internasional. Ini tentu hanya dapat terjadi jika ia memiliki Angkatan Laut yang kuat—setelah hancurnya Angkatan Laut China, sebagai akibat dibakarnya kapal-kapal angkatan laut mereka di pantai-pantai daratan China dalam abad ke-16 sampai dengan abad ke-17 M—segera kekosongan itu diisi oleh pelaut-pelaut Eropa dalam abad ke-10 Masehi. Perkecualiannya adalah Banten, yang melakukan internasionalisasi atas pelabuhan-pelabuhannya. Syahbandar pelabuhan Banten lama adalah seorang China, yang menunjukkan adanya internasionalisasi tersebut.

Bahkan, internasionalisasi itu juga terjadi di bidang-bidang lain. Di bidang militer, umpamanya, Pangeran Muhammad ditugaskan di pantai utara Banten selama bertahun-tahun dan meninggal di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya kerja sama yang erat dengan pihak Samudra Pasai, di Aceh. Deskripsi *Serat Centini*, karangan Ronggo Warsito,

tentang pesantren di Gunung Karang, di pantai barat Banten, juga menunjukkan adanya hubungan yang erat dengan berbagai kawasan bangsa-bangsa muslim pada waktu itu. Mengingat 14 macam subjek kajian-kajian Islam dari Imam Abdurrahman as-Sayuthi, yang termuat dalam buku beliau, *Itmam ad-Dirayah,* yang ditulis pada abad ke-16 M, masih dipakai di pesantren-pesantren dan perguruan-perguruan tinggi kita dewasa ini, jelas bahwa hubungan Banten dengan pusat-pusat dunia Islam sangatlah baik.

Jelaslah dengan demikian bahwa Banten berhasil menjaga keanekaragaman budaya di kawasan tersebut, dengan tetap mempertahankan keutuhan kerajaan. Ini terbukti dengan tetap terjaganya kawasan budaya kaum Badui asli di Banten Tengah dan Selatan. Yang jelas berbeda dari budaya kaum santri di kawasan lain. Bukti lain dari keragaman budaya dan agama terlihat di Pulau Panaitan. Pulau yang terletak di lautan Hindia—di sebelah barat daya Ujung Kulon itu—jelas menunjukkan terpeliharanya warisan budaya kaum pra-Islam.

❧

Situasi yang demikian kreatif itu, kemudian dirusak oleh kekuatan ekstenal dan internal Banten sendiri. Secara eksternal, blokade laut yang dilakukan pihak Belanda membawa akibat sangat luas, terhentinya proses internasionalisasi Banten. Keengganan pihak Mataram untuk mengadakan kerja sama laut dengan Banten, karena Sultan Agung lebih meng-

utamakan bentuk sistem agraris, hingga membuat Banten akhirnya meninggalkan lautan. Jadilah Banten sebuah kesultanan yang berorientasi pada pertanian dan melupakan kekuatan utamanya, yakni laut. Dengan begitu, Belanda dengan mudah mengirimkan kekuatan pasukan darat dari Batavia yang hanya 100 km jauhnya.

Tak heran, jika Gubernur Herman Willem Daendels dengan mudah membangun jalan raya antara Anyer di Banten dan Banyuwangi di Jawa Timur. Dengan cara demikian, mudahlah bagi pihak Belanda untuk memupus perlawanan. Modernisasi dalam bentuk transportasi dan komunikasi yang maju ternyata hanya menguntungkan pihak Belanda dan merugikan pihak Banten.

Apalagi setelah dirasakan kebutuhan akan sebuah hubungan dengan Pulau Sumatra, dengan membuka pelabuhan Merak, kebutuhan untuk mengamankan jalur tersebut dari gangguan para pejuang Banten, maka tekanan pemeliharaan jalur transportasi di Banten utara menjadi semakin besar. Akibatnya sangat jelas, yakni dalam bentuk dihancurkannya kekuatan politik Banten lama dan diserapnya struktur yang ada oleh kaum penjajah.

ଓଃ

Hal itu menjadi semakin diperparah oleh dua buah perkembangan intern Banten sendiri. Di satu pihak, pertentangan kaum birokrat Banten lama antara

kelompok Nayaka dan kelompok Sentana dibiarkan berlarut-larut satu sama lain, dibiarkan sama-sama menghancurkan lawan politik dengan mengambil muka kaum penjajah. Kombinasi antara kekuatan raja yang semakin melemah dan birokrasi yang semakin lama dimanipulasi oleh pihak penjajah, berakhir pada ketergantungan semakin besar kepada pihak asing itu. Melemahnya kekuatan negeri itu, berarti pula semakin kuatnya kelompok-kelompok masyarakat, yang semakin memperlemah kekuatan pemerintahan yang asli. Sebaliknya, kekuatan rakyat itu tidak cukup besar untuk mematahkan kekuatan asing. Hal ini tampak dalam hasil pemberontakan Cilegon yang dipimpin oleh KH. Wasik pada abad ke-19 M, dan pemberontakan "komunis" yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia tahun 1926. Dengan mudah pihak Belanda mematahkan kedua pemberontakan tersebut.

Dikombinasikan dengan ajakan-salah (*wrong suggestion*) dari kaum tarekat di Caringin, Labuhan. Akibatnya, terasa sangat fatal bagi orang Banten, sebagaimana umumnya kaum tarekat di Indonesia, Caringin menafsirkan ajaran *qana'ah* sebagai doktrin kepasrahan tanpa usaha sama sekali. Padahal, sebenarnya doktrin itu mengacu pada ajakan berusaha sekuat mungkin untuk melakukan sesuatu dan jika gagal untuk menyerahkannya kepada Allah.

Ini akan menghindarkan kita dari kegelisahan (*walag, anxiety*) manakala kita menghadapi kegagalan. Kombinasi antara kekuatan rakyat semakin lemah, dan

penerapan salah doktrin di atas, akhirnya membuat Banten semakin tak berdaya di hadapan kaum penjajah. Ini berbeda, misalnya dengan Dinasti Mataram yang bernasib sedikit lebih baik. Beberapa hal yang menjadi wewenang Kraton Mataram menunjukkan dengan jelas adanya kemampuan bertahan yang lebih baik dari Kesultanan Banten.

Dengan menjadi propinsi sendiri, timbul pertanyaan penting: Akan ke manakah Banten? Industrialisasi di Cilegon membawa anak-anak suku bangsa ke daerah tersebut untuk bekerja di sektor-sektor industri. Tetapi, orang-orang kelahiran Cilegon sendiri, banyak yang menjadi penggali pasir di Jakarta, adilkah ini? Kita belum tahu lagi apa yang terjadi dengan daerah Tangerang. Akankah bernasib sama seperti Cilegon? Ini berarti, keharusan bagi daerah untuk lebih memacu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, juga dengan memperhatikan bidang-bidang teknik penting di luar kepamongprajaan.

Dibukanya kereta peluru ajaib (*Sinkancen*) dari Banyuwangi ke Merak melalui pantai selatan dan pelabuhan kelas dunia oleh Li Kashing dan Hut Chinsen di Bojonegara, Tangerang, jelas menunjukkan akan diversifikasi SDM di Banten, di masa depan. Dikombinasikan dengan pentingnya keragaman budaya, maka sistem politik di Banten perlu memperoleh perbaikan sangat besar. Sanggupkah Banten melaksanakan hal itu?

Paso, 28 Desember 2001

Membaca Sejarah Lama (10)

Dr. Mattulada dari Makasar telah menggambarkan *adat siri* orang Bugis dalam sebuah karya tulisnya. Di situ tergam-bar betapa kebutuhan berpegang pada kehormatan (*siri*) merupakan tulang punggung sistem etika orang Bugis. Apabila kehormatan mereka dilanggar, tidak segan-segan mereka menggunakan kekerasan untuk mempertahankan diri dengan *badik* (pisau), dan jadilah sebuah pameo: "orang Bugis senang dengan kekerasan", seperti halnya dengan orang Madura yang mempraktikkan *carok*.

Sebenarnya, cara memandang seperti ini sangatlah dangkal. Sebab, *adat siri* memiliki kekayaan budaya yang sangat besar. Ini terbukti dari keragaman budaya yang telah berkembang, seperti terlihat dari tari-tarian mereka, aneka pakaian, dan hasil kerajinan yang sangat mengagumkan. Demikian juga sistem pertanian, serta perahu-perahu pinisi mereka yang sanggup mengarungi lautan hingga berbagai kawasan di Asia.

Pada kenyataan-kenyataan di atas, dapat ditambahkan sebuah kenyataan lain. Ahli sejarah, Dr. Taufik Abdullah, membagi hubungan Islam dengan kekuasaan kepada empat tipe. *Pertama*, hubungan

Islam dan kekuasaan di Aceh, dengan munculnya kerajaan-kerajaan kuat Islam dari kampung-kampung muslim, seperti di Peureulak dan Samudera Pasai. Dalam pola ini, pusat-pusat kerajaan dari kampung-kampung menggunakan hukum Islam sebagai acuan (*adat bak* kata *meureuhum*), karena adat ditundukkan oleh syari'at Islam. Tentu, ini dalam konteks tidak adanya penafsiran hukum itu sendiri dengan hanya menyandarkan diri pada literatur fiqh yang ada.

ঌ

Hubungan kedua terjadi di Minangkabau, dalam hal kekuatan adat dan syara' sama-sama berimbang. Masyarakat Minangkabau yang bersendikan adat (masyarakat *mathiarchat*) jelas-jelas bertentangan dengan sistem waris Islam yang *patriarchat*. Pepatah "adat bersendi syara', dan syara' bersendikan kitabullah", ternyata hanya menjadi pameo yang tidak terkait dengan kehidupan masyarakat. Perang Paderi, tahun 1822-1838, antara kaum adat dan syara' hanya dapat dihentikan oleh kekuatan penjajah Belanda, seperti tergambar dalam kemenangan Jenderal Kok di Bukit Tinggi.

Di Jawa, hubungan yang ada bersifat multi-kratonik, terjadi keragaman pola kehidupan antara negara (kraton-kerajaan) dan pesantren serta hal-hal sejenis di luar kraton. Selama pihak kedua ini secara nominal mengakui kraton-kerajaan sebagai pusat kekuatan, mereka dapat saja melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sekarang disebut *Ornop* (organisasi non-pemerintah) dalam pola Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM). Hal itu terjadi karena mereka yang mempraktikkan ajaran Islam (kaum santri) mempunyai hak yang sama di mata pemegang kekuasaan dengan kaum kejawen yang kurang mempraktikkan hukum Islam. Selama mereka mengikuti tahun baru Jawa (Saka)—yang bermula dari bulan Muharram (seperti tahun hijriyah)—serta lahir-kawin-dikuburkan dalam tata cara agama Islam, juga semangat raja dua kali bersembahyang di masjid, maka semua orang haknya dianggap sama dan dihormati sebagai warga negara yang sah.

Model terakhir, menurut tilikan Dr. Taufik Abdullah, adalah model Gowa, yang sekarang dipraktikkan oleh para sultan di negara-negara bagian Semenanjung Malaysia. Para pembawa agama Islam di Gowa, asalnya mereka berdagang dan lalu ada yang menjadi keluarga kerajaan tersebut. Maka dengan sendirinya terjadi asimilasi antara adat-adat pra-Islam dan Islam secara damai. Pola asimilasi antara adat dan syara' menemukan bentuk akhirnya dalam *adat siri* di atas. Kaum pelaut Bugis dengan tenang berlayar berbulan-bulan di laut, karena tahu bahwa adat akan melindungi keluarga mereka di rumah. Sebaliknya, pertemuan dengan negara-negara lain di kawasan ini menginternasionalisasikan mereka tanpa harus kehilangan identitas orang Bugis. Inilah yang membuat mereka dapat memimpin wilayah Indonesia bagian Timur yang terdiri dari berbagai suku bangsa.

Dengan adanya otonomisasi berbagai daerah dan propinsi di negeri kita, kepemimpinan orang Bugis atas wilayah Indonesia bagian Timur menjadi terancam. Minimal, secara geografis orang Bugis sangat sulit memainkan peranan perantara dengan Jakarta seperti di masa lampau. Hubungan langsung secara budaya dan politik antara pusat dan daerah membuat kebutuhan pada peranan orang Bugis menjadi sangat berkurang. Apalagi, kalau hubungan pelayaran dan penerbangan di Indonesia menjadi sangat beragam. Orang dapat saja terbang dari Jakarta atau wilayah lain di Indonesia bagian Barat melalui persinggahan di Nusa Tenggara Barat atau Banjarmasin. Masyarakat Bugis dengan kawasannya sendiri akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga: keunikan.

Hilangnya keunikan geografis itu harus dapat diganti oleh sebuah keunikan lain (yaitu, keunikan kultural). Dengan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM)—yang sesedikit mungkin mengambil dari luar—masyarakat Bugis dapat menjadi contoh yang sangat berharga bagi sistem-sistem budaya lain di wilayah Indonesia bagian Timur. Dengan melakukan kombinasi yang tepat, antara capaian kemahiran (*skill*) dari Barat dan sistem etika (moralitas) yang dibawakan *adat siri*, maka masyarakat Bugis dapat mengembangkan keunikan budayanya sendiri. Ini akan menjadi kombinasi kultural yang sangat dibutuhkan oleh seluruh wilayah kehidupan bangsa Indonesia. Apalagi kalau mereka tinggal di luar negeri

untuk waktu yang cukup lama. Karena itu, diperlukan penggalian lebih jauh serta publikasi atas *adat siri* (dalam masyarakat Bugis). Ini juga sekaligus untuk menangkal adanya pendangkalan agama Islam yang terjadi saat ini, ketika mereka yang hanya bersandar pada teks-teks dasar (al-Qur'an dan hadis) takut kehilangan identitas mereka dan melupakan tradisi dan adat yang telah berkembang. Sanggupkah masyarakat Bugis melaksanakan hal di atas?

Jakarta, 31 Desember 2001

Membaca Sejarah Lama (II)

Cerita wayang yang berkisar pada pertempuran fisik antara pihak Pandawa melawan Kurawa, berlangsung di padang Kurusetra. Satria Pandawa, anak Pandu dari Kunthi, merupakan pergulatan antara unsur baik berhadapan dengan unsur buruk/jahat yang ada dalam alam bawah sadar orang Jawa. Jadi, bukannya konsep baik dan buruk ala India yang menjadi dasar atau sumber asal dari cerita kedua keluarga tersebut. Dengan kata lain, cerita dasar dari India digunakan, tetapi konsep budaya yang dipakai memang benar-benar asli Jawa.

Konsep yang digunakan itu pun berbeda dari konsep budaya masyarakat Barat, yang melihat *cowboy* sebagai pembawa kebaikan permanen, berhadapan dengan para bandit (*the gun-men*) yang memancarkan kejahatan abadi. Dengan kata lain, dalam konsep ini, secara kualitatif *cowboy* pada dasarnya adalah mewakili kebaikan, sedangkan para bandit mewakili kejahatan. Jadi, dalam konsep ini, kebaikan adalah sesuatu yang abadi dan bandit mewakili kejahatan abadi. Tak ada kemungkinan si bandit menjadi orang baik, dan *cowboy* menjadi orang jahat. Gambaran hitam-putih

ini terlihat jelas dalam kasus-kasus aneka film kartun yang kini memenuhi layar televisi dan membentuk cara pandang anak-anak kita.

Konsep cerita-cerita tersebut, yang berbeda satu dari yang lain, menunjukkan pada kita latar belakang pembentukan pandangan hidup di masing-masing masyarakat ini. Dalam masyarakat modern/Barat, seorang *cowboy* akan terus-menerus membawakan kebaikan, dan begitu sebaliknya, para bandit selamanya akan membawakan kejahatan. Sedangkan dalam konsep budaya Jawa, kaum Kurawa masih memiliki peluang untuk menjadi manusia yang baik, jika mereka berkembang dari aspiran kebaikan—menjadi seperti kaum Paridawa, yang telah mencapai (*wasilun*) kesempurnaan jiwa. Pertempuran fisik di padang Kurusetra antara kaum aspiran (*salikun*) melawan kaum Pandawa, secara fisik menggambarkan sisi lain dalam pergulatan budaya yang terjadi. Konsep tasawuf jelas menunjukkan adanya pengaruh budaya wayang di Jawa pada konsep budaya yang dikembangkan kaum santri melalui pesantren-pesantren mereka.

❧

Konsep budaya kaum santri itu tampak jelas dalam perencanaan (planologi) kaum santri dalam pesantren-pesantren lama. Ini penting untuk dikaji secara objektif karena menyangkut penyerapan konsep budaya wayang di Jawa oleh kaum pesantren. Inilah hal yang luput dari perhatian kita selama ini, karena

hanya melihat pesantren sebagai entitas tersendiri—yang terlepas dari budaya dialogis.

Dalam perencanaan pesantren lama, sekarang masih terlihat dalam pembangunan pesantren lama di Denanyar, Jombang, memberikan gambaran yang jelas. Kita memasuki *plaza* (tanah lapang) di depan masjid, dengan rumah sang kiai di sebelah utaranya dan tempat (kombong) santri di sebelah selatannya, memperlihatkan sebuah penghadapan yang nyata antara kiai dan santri. Hal itu melambangkan peranan kiai yang telah mencapai kesempurnaan pengertian tentang Tuhan (*wasilun*), melawan para santri yang menjadi perambah jalan (*salikun*) untuk mencapai kesempurnaan pengertian sebagai kiai di masa depan.

Peperangan antara kesempurnaan pengertian tentang Tuhan (*wasilun*) dan para santri yang masih merambah jalan (*salikun*) menunjukkan dalam konsep ini tertampung perubahan-perubahan watak yang terjadi. Karenannya, masjid dijadikan pengganti padang Kurusetra dalam cerita wayang, yang menggambarkan peperangan fisik. Padahal, pergulatan di masjid yang berada di tengah-tengah komplek, adalah pertarungan jiwa para kiai dalam menundukkan aspirasi salah para santri. Dengan demikian, jelas konsep yang digunakannya sangat berbeda dari konsep Barat tentang "kebaikan" melawan "kejahatan" yang abadi tadi.

☙

Karenanya, dalam melakukan modernisasi atas konsep pendidikan kita, haruslah diketahui aspek-

aspek budaya seperti ini. Kalau kita secara serampang-an menerapkan konsep-konsep budaya orang Barat, hasilnya adalah kita akan kehilangan sesuatu yang besar tentang konsep budaya kita sendiri di masa lampau. Konsep inilah yang membentuk pandangan hidup generasi lampau dan generasi sekarang dari bangsa kita yang sadar. Konsep budaya Barat yang materialistik, karena ukuran-ukuran yang digunakan hanya didasar-kan pada capaian materialistik dari filsafat positivisme yang dibawakan oleh tokoh pendidik Amerika Serikat, John Dewey, jelas menunjukkan adanya hal ini. Dua konsep budaya/pendidikan tersebut menunjukkan kepada kita perkembangan yang tidak simetris dalam proses modernisasi.

Kita kehilangan gambaran sejarah/historis dan hanya melihat positivisme dari sudut konseptualnya belaka. Akibatnya, yang terjadi adalah penguasaan kecakapan/ketrampilan yang diukur secara materia-listik, yang berakhir pada ujung tercapainya peng-akuan dalam bentuk gelar yang kosong dari etika/moralitas/akhlak yang baik. Padahal, etika dalam bentuk tanggung jawab sosial para perenggut gelar, adalah kejadian biasa dalam masyarakat Barat yang dianggap materialistik itu. Dalam hal ini, terjadi lompatan teknis dari masyarakat Barat ke masyarakat kita, dengan akibat menciutnya pengertian akan konsep-konsep budaya/pendidikan yang kita gunakan. Sebuah peristiwa yang luput dari perhatian kita sama sekali, yaitu pemindahan kemahiran/ketrampilan ke

mari tanpa adanya pengertian yang mendalam akan latar belakang historisnya.

Karena itulah para konseptor budaya/pendidikan kita haruslah memiliki kearifan untuk melihat proses modernisasi sebagaimana adanya. Kegagalan dalam hal ini hanya mengakibatkan distorsi budaya/pendidikan yang sangat besar dalam pendidikan kita. Kearifan diperlukan dalam hal ini untuk melihat penggunaan konsep-konsep budaya/pendidikan sebagai proses historis yang utuh, bukannya sepotong-potong saja. Ini adalah sebuah kritikan tajam atas proses yang terjadi, yang meninggalkan kenyataan sejarah. Tanpa memperhatikan ini, yang terjadi adalah pemindahan teknologi ke sini, tanpa menggunakan kerangka yang tepat. Ini sangatlah berbahaya, seperti yang terjadi dalam sistem pendidikan nasional kita. Pendidikan sekarang hanya ditekankan pada aspek pendidikan formal belaka, dengan gelar dan diploma yang dihasilkan. Tidak pernah dipikirkan sedikit pun bahwa pendidikan non-formal dan informal yang hidup di masyarakat, seperti pengajian, kongregasi gereja, dan arisan. Di sinilah gunanya kita mengenal sejarah lama kita. Janganlah kita menjadi tokoh—seperti yang digambarkan Albert Camus dalam novelnya, yang memenangkan hadiah Nobel untuk bidang sastra, yakni *E'strangger* (orang asing). Dalam novel tersebut, sang tokoh mengalami keterasingan (*isolasi*) dari masyarakat dan pergaulan hidupnya.

Manado, 30 Januari 2002

Membaca Sejarah Lama (12)

Fahien yang beragama Budha menuliskan pengalaman dan penglihatannya dalam perjalanan dari daratan China, melalui laut, ke India. Ia singgah di Pulau Sumatra dan bercerita tentang Kerajaan Sriwijaya. Dari tulisan Fahien itu, didapati bahwa Kerajaan Sriwijaya mengikuti agama Budha. Tanpa menyebutkan hakikat kerajaan tersebut, kita lalu tahu bahwa Sriwijaya adalah kerajaan maritim pada waktu itu. Yang tidak jelas—dan tidak diceritakan oleh Fahien—adalah asal usul kerajaan tersebut: Tulang Bawang di daerah Lampung-kah atau Jambi.

Cerita Fahien itu diperkuat pula oleh catatan sejarah yang menceritakan tentang penyerbuan Wangsa Syailendra di Sriwijaya tersebut atas kerajaan Hindu Kalingga di Jawa Tengah. Dari catatan sejarah itu, kita tahu, bahwa Kerajaan Sriwijaya memiliki kekuatan yang besar, berarti jumlah penduduk yang banyak dan keuangan yang kuat. Serangan di abad ke-6 Masehi itu akhirnya dimenangkan oleh wangsa yang beragama Budha, yang melahirkan Candi Borobudur. Tetapi, justru pembangunan candi raksasa itulah yang me-

miskinkan Kerajaan Sriwijaya, dan membuatnya hancur tanpa warisan pada abad ke-8 dan ke-9 M.

Sebuah episode besar dari sejarah lama kita berlalu tanpa dramatisasi, dan kita ketahui hanya dari cerita yang pendek dalam kisah perjalanan Fahien dan catatan sejarah kita. Dalam hal ini diperlukan rekonstruksi kesejarahan yang banyak bersandar pada kemampuan visualisasi kita sebagai pengamat sejarah. Tanpa kemampuan rekonstruksi seperti itu, kita akan menjadi buta tentang sejarah lama bangsa sendiri. Di sinilah kita memerlukan investigasi kesejarahan dan kemampuan mencari data kesejarahan dari cerita-cerita yang ada dan catatan-catatan yang masih tertinggal.

଼ଓ

Sebaliknya, pengetahuan kita dari sumber-sumber tertulis tentang Kerajaan Kutai, Kerajaan Bacan, Kerajaan Temate, Kerajaan Tidore, serta Kerajaan Keilolo hampir tidak ada yang tertulis, tetapi dari cerita-cerita lisan. Meski demikian, dari cerita-cerita lisan itu, yang bercampur antara cerita fiktif dan informasi aktual, harus dapat dibuat rekonstruksi kesejarahan yang konkret. Umpamanya saja, mengenai jumlah dan jenis pasukan pengawal kerajaan. Kemampuan melakukan rekonstruksi secara lengkap, bersandar pada cerita-cerita fiktif dan aktual sekaligus, harus dimiliki oleh mereka yang ingin menuliskan sejarah tempat-tempat tersebut.

Banyak alat bantu yang dapat digunakan untuk melakukan rekonstruksi dimaksud. Misalnya saja, cerita-cerita tutur mengenai para pahlawan dan raja-raja daerah itu. Dengan demikian, diperlukan kemampuan untuk mendengarkan dan mengumpulkan cerita-cerita tutur tersebut. Demikian pula, tentu diperlukan biaya tidak sedikit untuk melakukan perjalanan berulang kali ke kawasan-kawasan di atas, dan kemahiran untuk menyadap, dari tokoh-tokoh tua yang masih ada—umumnya menggunakan bahasa daerah.

Karenanya, di samping kemahiran sejarah, dibutuhkan pula kecakapan berbahasa daerah serta biaya yang tinggi. Di sini, pengetahuan seperti itu—yang sekarang hampir-hampir tidak dihargai orang—merupakan kekuatan pemerintahan kolonial di masa lampau. Kalau kita pelajari laporan-laporan tertulis, berbagai karya ilmiah di masa itu, dan buku-buku yang diterbitkan, jelas hal itu terasa sangat penting bagi penguasa kolonial di masa lampau. Apa pun motifnya, seperti kebutuhan untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan kolonial dengan mengalahkan "sumber-sumber pribumi" sangatlah menarik untuk diperhatikan.

❧

Dengan demikian, nyatalah bagi kita betapa penting arti karya-karya lama mengenai berbagai daerah kita di masa lampau. Tanpa karya-karya itu tidaklah mungkin kita mampu memahami masa

lampau kita sendiri. Meski kelihatannya hanya berbentuk cerita-cerita tentang suatu daerah atau tokoh tertentu, kehadirannya sangatlah diperlukan jika kita ingin mengetahui masa lampau kita sendiri.

Beberapa buku deskriptif yang telah ditulis tentang pelbagai aspek kehidupan daerah, sangatlah penting bagi kita. Di sini, buku *The Rope of God* dari James .T Siegel dapat dikemukakan sebagai contoh. Hasil penelitian antropologis tentang daerah Aceh ini merupakan sesuatu yang sangat penting mengenai daerah tersebut. Deskripsinya tentang kaitan antara keyakinan agama orang Aceh dan kesenian yang mereka kembangkan (seperti tarian *seudati*) merupakan keharusan bagi mereka yang ingin mempelajari perkembangan Islam di daerah tersebut.

Demikian pula, beberapa buku yang memuat penafsiran tentang perkembangan sebuah cara pandang sangatlah menarik untuk dipelajari lebih jauh. Seperti karya-karya Peter Carey tentang "ekologi budaya" orang Jawa sangatlah relevan untuk dikaji. Ia mengemukakan berbagai cara pandang orang Jawa tentang Perang Diponegoro (Perang Jawa) pada 1825—1830. Pangeran Diponegoro sendiri, dalam masa pembuangannya di Makasar, bercerita melalui Babad Diponegoro, bahwa ia hanya melaksanakan tugas kesejarahan, sebagaimana Arjuna melakukan tugas budaya. Para bawahan (Bekel, istrinya bernama Supraba) dan bagaimana ia memperoleh penugasan di Gua Selarong, secara keseluruhan menunjuk pada persamaan dengan tokoh wayang

Arjuna tersebut. Sebaliknya, seorang Bupati di Purworejo menggambarkan tokoh kita itu sebagai seorang yang sombong. Kegagalannya dalam mencapai tujuan, menurut pandangan pejabat Belanda ini, dalam *Kidung Kebo*, bermula dari kesombongan tersebut. Sedangkan Babad Surakarta yang dibuat di Kraton Solo, melihat hal itu secara "normal" belaka. Banyak upaya yang berhasil, dan tentu, banyak pula yang gagal.

Jelaslah dari uraian di atas, berbagai cara pendekatan dan penafsiran merupakan alat-alat sejarah yang diperlukan untuk mengenal kehidupan bangsa kita di masa lampau. Terpulang kepada kita sebagai bangsa, ingin memahami masa lampau itu atau tidak.

Jakarta, 3 Februari 2002

Membaca Sejarah Lama (13)

Berbagai karya tulis tentang sejarah masa lalu kita patut untuk diperhatikan. Sebagai contoh, dapat diambil kasus kedudukan orang kaya di berbagai daerah di negeri kita pada masa silam. Di Aceh, pemerintahan selama masa yang panjang dipegang oleh orang-orang kaya. Dengan melemahnya kedudukan mereka, yang terjadi karena perubahan struktur ekonomi dan perimbangan kekuatan militer, akhirnya mengakibatkan lemahnya pemerintahan kesultanan di daerah tersebut, dan orang-orang Belanda tinggal menyudahi kekuasaan mereka. Itu pun harus dilakukan dengan susah payah, terkenal dengan nama *Perang Marsose* yang berlangsung selama 40 tahun. Di saat itu, para ulama (Tengku Dayah) dan para panglima (Teuku) memimpin perlawanan terhadap pihak Belanda.

Di Sumatra Barat, peranan orang kaya juga tidak kecil dalam menentukan jalannya kehidupan masyarakat. Gelar seperti Rangkayo Rasuna Said, menunjukkan besarnya peranan mereka. Mungkin ini disebabkan oleh kekuasaan berimbang antara para ulama dan pemilik adat. Keseimbangan kekuatan itu terlihat dari

Perang Padri yang berlangsung selama 16 tahun, tanpa ada kekuatan pusat yang dapat menyudahinya. Baru pada 1838, pasukan-pasukan kolonial yang dipimpin Jenderal de Kok dapat mengakhirinya.

Pepatah "adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan kitabullah" menunjuk pada kemacetan budaya itu. Dalam kenyataan, peranan pemuka adat dalam (*ninik mamak*) sangatlah besar pengaruhnya dalam perkawinan dan pembagian warisan, seperti tiadanya peran menentukan bagi sang ayah dalam kehidupan di daerah itu hingga akhir-akhir ini. Begitu pula yang menyebabkan kesediaan para intelektual Minang untuk menggunakan hukum Barat, dan penyebaran sangat luas kaum rantau Padang di seluruh Nusantara.

ଓଃ

Lain halnya dengan daerah Banten. Di daerah itu, jelas terlihat dikotomi yang menjadi ciri utama masyarakat, antara ulama dan pejabat pemerintahan masa kini, bahkan dalam beberapa hal terlihat kekuasaan ulama menjadi sangat besar. Kaum Badui Ash, terutama diwakili oleh para Karuhun, tampak didominasi oleh para penguasa pemerintahan. Terkadang, batas antara keduanya menjadi kabur, seperti halnya Kiai Chatib yang menjadi residen pada permulaan kemerdekaan, dan memerintahkan dicetaknya mata uang Republik (ORI, *Oewang Republiek Indonesia*), di samping Kiai Syamun Cilegon, yang untuk beberapa waktu, pada masa itu, menjadi Bupati Serang.

Munculnya kekuatan ulama itu disebabkan oleh pertentangan para pejabat (*Santana* melawan *Nayaka*) di masa lampau. Dalam beberapa puluh tahun terakhir ini, kita masih menyaksikan munculnya Golkar, yang menguasai pemerintahan berhadapan dengan para ulama yang tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pertarungan dimenangkan oleh Golkar yang juga mempunyai ulamanya sendiri. Sedangkan secara sosiologis, mayoritas penduduk Banten adalah pengikut NU, seperti halnya para ulama Caringin dan Menes, dengan contoh (alm.) KH. Nahid Abdurrahman (Ketua Umum Mathla'ul Anwar).

Ternyata, di balik pertentangan kepentingan antara kelas atas (elite) itu, masyarakat Banten juga menampilkan kelas bawah (mayoritasnya adalah petani). Mereka inilah yang oleh Partai Komunis Indonesia didorong untuk memberontak terhadap kaum penjajah pada 1926, dan diklaim sebagai pemberontakan petani Banten. Pemberontakan bersenjata itu ditumpas dengan mudah oleh pemerintah kolonial Belanda, karena memang jumlah petani yang terlibat sangatlah sedikit. Terkenal tinjauan kritis yang ditulis oleh Hoesein Djajadiningrat, yang memberikan petunjuk yang jelas dan kritik yang pedas dalam hal ini.

❧

Dalam hal ini, jelas tampak penting arti keterangan tertulis ataupun lisan yang dapat dikumpulkan.

Keterangan seperti itulah yang harus dicari para sejarawan kita, yang cenderung memperlakukan sumber-sumber hanya dari "bukti-bukti kesejarahan belaka". Sedangkan yang tidak memiliki label "kesejarahan" tidak dianggap penting sama sekali oleh mereka, dengan akibat pengetahuan akan masa lampau kita sendiri menjadi sangat kecil. Sejarah hanya dimiliki oleh para pelaku formal dengan bukti-bukti resmi, dan di luar itu tidak dianggap memiliki autentika kesejarahan.

Dapat dipakai sebagai contoh dalam hal ini kasus tanda kesejarahan (*coat of arms*) berupa sebingkai ukiran kayu yang terkenal di Masjid Demak, di samping mimbar. Kayu itu memperlihatkan seekor kura-kura/penyu dengan gambar sambaran halilintar di punggungnya. Ukiran penyu itu menggambarkan ungkapan bahasa China yang berarti raja berumur panjang (*ban swie*), dalam bahasa Jepang disebut *banzai*, yang diterapkan atas Raden Fattah sebagai pendiri Kesultanan Demak. Sedangkan pancaran kilat/halilintar adalah gambaran Maulana Ishak at-Tabarqi yang menjadi keturunan orang-orang *Carthago* di Afrika Utara, yang dalam sejarah modern dikenal dengan nama *Tabruk*, tempat pertempuran tank antara Jenderal Jerman Erwin Rommel dan Marsekal Inggris Montgomery dalam Perang Dunia II (di zaman Romawi dikenal dengan nama *Cyrenaica* dan pada masa pra-Romawi dikenal dengan nama Carthago).

Jelaslah dengan demikian, para sejarawan kita tidak dapat melakukan pilihan antara berbagai jenis keterangan historis. Diperlukan waktu lama untuk menggali dan mengangkat cerita-cerita tutur dan tertulis yang hidup di kalangan bangsa kita untuk menjadi sumber-sumber sejarah yang autentik. Segala macam keterangan itu haruslah diserap dan kemudian diolah untuk menjadi keterangan sejarah yang autentik. Begitu pula, kecenderungan-kecenderungan umum, seperti peranan orang kaya, pejabat/penguasa pemerintahan, ulama, para panglima, dan rakyat biasa menjadi sumber yang sangat penting untuk mengenal sejarah kita sendiri di masa lampau. Cerita Kebo Ijo yang kian kemari memeragakan keris saktinya, yang kemudian digunakan Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung dan mengakibatkan Kebo Ijo sendiri dihukum mati dengan tuduhan pembunuhan tersebut, juga menunjukkan arti penting dari intrik-intrik yang terjadi di kalangan para penguasa (*abdi dalem kraton*). Semua itulah yang harus dicerna oleh para sejarawan kita, dan dengan demikian bentuk definitif sejarah kita masih sangat lama akan tercapai.

Semarang, 10 Februari 2002

Membaca Sejarah Lama (14)

Tanah pekuburan Troloyo berada tak jauh dari tanah pekuburan Trowulan, dekat Brangkal (Mojokerto). Pekuburan tanah Trowulan menyimpan kuburan Brawijaya V, permaisurinya, Kencana Wungu, dan istri selirnya, Putri Cempa. Ternyata, menurut cerita tutur, Prabu Brawijaya V itu adalah seorang muslim karena istri selirnya, yang berkebangsaan China dan berasal dari Cambodia itu, adalah seorang muslim pula. Dia adalah ibu dari Raden Fatah (*Tan Eng Hoat*), yang belakangan mendirikan Kesultanan Demak bersama dengan Maulana Ishak at-Tabarqi.

Sebaliknya, tanah pekuburan Troloyo, yang hanya satu kilometer jauhnya, juga menyimpan kuburan Syaikh Abdul Qohar (*Maling Cluring*), Kiai Usman Ngudung, Tan Kim Han (menantu Puteri Cempa) yang juga beragama Islam dan memiliki nama Arab Abdul Qodir Jaelani, dan masih banyak lagi pejuang-pejuang muslim lainnya. Mereka gugur di tempat itu ketika menahan serbuan seorang Adipati Majapahit di Kediri, Kusuma Wardani, yang juga anak Brawijaya V. Adipati yang beragama Hindu-Budha ini adalah orang yang tidak rela jika istana

Majapahit dikuasai orang Islam, karenanya ia berusaha merebut takhta dari tangan Brawijaya V dengan kekerasan. Adipati inilah yang kemudian dikenal dengan nama Prabu Brawijaya VI, raja terakhir Majapahit. Sedangkan Prabu Brawijaya V meninggalkan istana dan bertapa di Gunung Lawu—dan sekarang terkenal dengan nama Sunan Lawu.

Data sejarah yang dikemukakan cerita tutur ini kemudian diperkuat dengan data sejarah lain, yaitu prasasti yang ditemukan Dr. Habib dari IKIP Malang. Menurut prasasti ini, pada tahun sangkala *sirna ilang kertaningbumi* (tahun 1400 Saka, menurut Empu Prapanca), telah diberikan gelar Romo Bayan Ampel oleh Brawijaya V atas meninggalnya seseorang dari Desa Ampel di Surabaya. Ini berarti gelar yang diberikan kepada Sunan Ampel (salah satu wali sembilan) oleh seorang muslim pula. Inilah yang mendukung spekulasi penulis bahwa beliau masuk agama Islam, minimal pada akhir hayatnya.

Cerita tutur di atas, yang dilengkapi dengan data prasasti tentang Romo Bayan Ampel itu, menunjuk dengan jelas pergulatan orang-orang beragama dalam istana Majapahit pada masa akhir kerajaan tersebut. Yang belum jelas bagi penulis, siapakah adik Sunan Ampel, yang dikatakan menjadi *besan* Brawijaya V. Pergulatan ini berlangsung sengit, diakhiri dengan peristiwa Troloyo dan disusul dengan penyerbuan Majapahit oleh pasukan rakyat para wali sembilan

(walisongo) yang dipimpin oleh Sayyid Abdurrahman dari Ngroto (dulu Demak dan sekarang Grobogan/ Purwodadi), terkenal dengan sebutan Ki Ageng Ganjur (sejenis alat pemukul di bawah gong dalam urutan perangkat gamelan wayang). Rupanya, ganjur (*genjur*) ini digunakan panglima tersebut se-bagai alat komunikasi dengan 350 ribu pasukan rakyatnya, karena waktu itu belum ada HT. Karena Ki Ageng Ganjur adalah pembangun jembatan bambu di daerahnya, dapatlah diduga ia diangkat menjadi panglima karena penguasaan tekniknya. Penyerbuan Kusuma Wardani atas Majapahit di Troloyo itu telah mengakibatkan hancurnya—untuk sementara waktu—kekuatan militer kaum muslimin. Tetapi, itu harus dibangun mahal oleh sejarah bangsa kita, karena pasukan para wali sembilan yang dipimpin Ki Ageng Ganjur itu lalu menghancurkan secara total Kraton Majapahit, sebagai gantinya didirikanlah Kesultanan Demak, dengan keturunan Majapahit, yaitu Raden Fatah yang menjadi Sultan pertamanya. Inilah hasil pergulatan militer yang penuh dengan kekerasan, seperti halnya yang pernah dilancarkan Kusuma Wardani.

Perbedaan strategi dari masa Sunan Ampel yang dijalankan melalui jalan damai itu akhirnya diteruskan dengan pergulatan menggunakan kekerasan di zaman Sunan Kalijaga. Bahwa Sunan Kalijaga—kalau perlu bersedia menggunakan kekerasan—dapat dilihat dalam kasus Syaikh Siti Jenar. Syaikh kita ini telah mengajarkan *wihdat al-wujud wihdat asy-syuhud*

(*manunggaling kawulo lan gusti*) kepada orang awam, yang belum melaksanakan hukum-hukum syari'at, seperti shalat. Jadi, bukan berarti didasarkan atas penolakan Sunan Kalijaga terhadap aliran tasawuf tersebut, sebagaimana diduga Dr. Alwi Shihab dalam disertasi doktornya di muka Universitas 'Ain Syam di Kairo.

☙❧

Dari penuturan di atas, jelaslah membaca sejarah masa lampau kita tidaklah mudah. Di samping data sejarah tertulis, harus juga digunakan data yang diambil dari cerita-cerita tutur. Ini berari kemampuan menggunakan bahasa lokal, di samping kemampuan menggali cerita-cerita tutur yang ada. Itu pun belum menjamin autentisitas data tersebut hingga spekulasi kesejarahan harus dilakukan.

Dengan demikian, faktor kredibilitas dan kejujuran sehari-hari sejarawan yang bersangkutan sangatlah menentukan. Sejarawan yang jujur dalam memberikan presentasi tertulis tentulah memiliki kredibilitas yang tinggi. Sedangkan sejarawan yang tidak demikian, sebaiknya tidak melakukan spekulasi apa pun. Dalam hal ini, sejarawan yang secara resmi menjadi anggota partai politik, apalagi pengurusnya, sebaiknya tidak melakukan spekulasi apa pun, karena bagaimanapun juga, kredibilitas semua partai politik di negeri ini belumlah tinggi, dan bahkan sering tidak dipercaya orang.

Jelaslah, dari kasus Majapahit di atas, kerja membuat rekonstruksi sejarah memang bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Ia terkait dengan kecakapan dalam menggunakan data secara tertulis ataupun kemampuan menimbang cerita-cerita tutur. Di samping itu, ia memerlukan kesadaran etis yang tinggi dan kejujuran mutlak dari sang sejarawan. Sejarah jualah yang akan menentukan apakah kerja yang dilakukan mempunyai nilai atau tidak, dan bukannya kekuasaan.

Surabaya, 5 Februari 2002

Membaca Sejarah Lama (15)

Penyerbuan para wali sembilan (walisongo) atas ibu kota Majapahit adalah kejadian yang sangat menarik untuk diketahui. Karena banyak pelajaran yang dapat ditarik dari peristiwa tersebut. Ia bermula dari serbuan Kusuma Wardani yang memimpin Kadipaten Kediri, salah seorang putera Prabu Brawijaya V, atas prajurit muslim di Troloyo—sekitar satu kilometer dari Trowulan. Kusuma Wardani, menurut spekulasi penulis, marah atas proses islamisasi Kraton Majapahit. Karena kemarahan tersebut, ia memutuskan untuk menyerbu kraton itu dan berhasil mengusir Prabu Brawijaya V yang, selanjutnya, melarikan diri ke Gunung Lawu—sebelah barat Magetan sekarang, dan di sana dikenal dengan sebutan Sunan Lawu.

Sehabis menyerbu Kraton Majapahit, pasukan-pasukan Kusuma Wardani menyerbu pertahanan kaum muslimin di Troloyo, dekat Trowulan. Dalam pertempuran sengit yang terjadi, berguguranlah Syaikh Abdul Qohar (*Maling Cluring*), Syaikh Usman Ngudung, dan Tan Kim Han, salah seorang duta besar China yang beragama Islam dan menggunakan nama Arab Syaikh Abdul Qadir Jaelani. Di tempat itulah

dikuburkan orang-orang Hindu-Budha, setelah Kerajaan Majapahit hancur total.

Pelajaran berharga dari serangan Kusuma Wardani itu adalah pentingnya arti kerukunan umat beragama antara Islam dan Hindu-Budha yang terganggu sejak Syaikh Jamaludin Husein berpindah dari Bojonegoro ke Majapahit. Di tempat baru itu, ia membeli tanah-tanah yang dirampas dari tangan para penunggak hutang, seperti yang dilakukan BPPN kita sekarang, yang merampas perusahaan-perusahaan milik para konglomerat yang tidak mau mengembalikan kredit mereka ke berbagai bank. Dan, Sayyid Jamaludin Husein mengembalikan tanah-tanah itu kepada para pemilik jika mereka memeluk agama Islam.

ঔ

Gugurnya para pemimpin tentara Islam di Troloyo itu, diikuti oleh penguasaan Kusuma Wardani atas Kraton Majapahit yang lebih mempertahankan agama Hindu-Budha, hingga mengakibatkan reaksi tajam. Para wali sembilan, yang sementara itu telah berhasil mendirikan Kesultanan Demak, memutuskan untuk menggunakan kekerasan dan membentuk pasukan rakyat, yang berjumlah sekitar 350 ribu jiwa. Untuk memimpin pasukan itu, mereka menunjuk Sayyid Abdurrahman dari Ngroto, di sebelah timur Semarang (dahulu termasuk Kabupaten Demak, sekarang wilayah Grobogan, Purwodadi). Panglima ini bergelar Ki Ageng Ganjur—sebuah alat musik pukul-

an di bawah gong dalam perangkat gamelan wayang—sebagai alat komunikasi dengan pasukan-pasukannya.

Sayyid Abdurrahman Ngroto dipilih sebagai panglima karena ketrampilan teknologisnya, tepat seperti lulusan ATKAD, semisal Try Sutrisno. Dilakukannya penggunaan alat musik pukul itu sebagai alat komunikasi dengan pasukannya, sebab saat itu belum ada HT dan sejenisnya. Juga, ia dipilih menjadi panglima pasukan-pasukan penyerbu Majapahit, karena ia harus menyeberangkan semua prajurit rakyat sebesar itu dengan melintasi dua buah sungai, Bengawan Solo dan Brantas. Kisah penyeberangan itu sendiri, menurut cerita tutur, sangat menarik untuk didengar karena di dalamnya tersembur kegigihan anak manusia melawan rintangan alam yang dihadapi mereka.

Kisah penyeberangan menurut cerita tutur itu membawakan pelajaran kedua bagi kejadian sejarah, yaitu bagaimana manusia harus mengatasi rintangan alam yang sangat berat melalui penerapan teknologi tepat dan pengorganisasian diri yang sepadan dengan kebutuhan. Alam harus ditundukkan dengan teknologi dan pengorganisasian, dan prinsip ini harus dipegang teguh oleh anak manusia di segala zaman. Keberhasilan para wali sembilan dan panglima mereka itu—dalam menempuh cara tersebut untuk mewujudkan keinginan politik mereka—menunjukkan derajat kemasyarakatan yang tinggi yang ada waktu itu.

Keputusan untuk membumihanguskan Kraton Majapahit, setelah pasukan-pasukan Islam mengalahkan Prabu Brawijaya VI (posisi dan gelar yang digunakan Adipati Kediri setelah mengalahkan tentara Islam di Troloyo), merupakan pelajaran penting ketiga yang diambil dari rangkaian peristiwa di atas. Pelajaran itu adalah: jika kau kalahkan dan kuasai lawan, hancurkan kraton mereka. Ini adalah kerugian sangat besar bagi sejarah, sebab catatan-catatan sejarah menjadi musnah dan kita kehilangan data tertulis darinya.

Kesultanan Demak telah melakukan hal itu, dan kita banyak kehilangan data sejarah yang tertulis, kehilangan apa yang harus dikompensasikan oleh cerita-cerita tutur yang terkadang sangat meragukan keautentikannya. Selain itu, menurut Dr. Sudjatmoko, letak geografis kerajaan-kerajaan Indonesia yang terdapat di daerah khatulistiwa/tropis, juga ikut membuat kerusakan-kerusakan besar bagi begitu banyak peninggalan sejarah kita. Menurutnya, letak geogafis kita, seperti juga halnya letak geografis budaya Afrika maupun budaya Inka dan Maya di Amerika Tengah, bersifat ahistoris.

Pelajaran penting lain yang dapat ditarik dari peristiwa itu adalah pentingnya arti toleransi antaragama, bagi bangsa-bangsa atau suku-suku bangsa yang ada di kawasan ini. Pelajaran ini dapat dimengerti dengan tepat oleh para pendiri Republik kita, dengan kearifan untuk menghapuskan Piagam Jakarta di dalam pembukaan UUD 1945. Sebuah sikap yang

tidak bertentangan dengan *fiqh* (hukum) Islam, karena kalau keputusan penghapusan itu yang diambil oleh para pendamping Islam yang tergabung dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dari berbagai aliran, ternyata tidak ditentang oleh para pejuang yang tegar dari masa itu, seperti KH. Hasyim Asy'ari Tebuireng dan KH. M. Bisri Sansuri, Denanyar.

Jakarta, 7 Februari 2002

Membaca Sejarah Lama (16)

Dewasa ini, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang menurut bahasa Inggris *Non-Governmental Organization/NGO*, tumbuh dengan subur di negeri kita. Semasa masih ada tekanan-tekanan dari Orde Baru (Orba), LSM telah tumbuh ratusan buah banyaknya dan bermacam-macam pula orientasinya. Ada yang anti-pemerintah, ada yang mendukung pemerintah, dan ada yang mencoba menjadi penengah. Di tengah-tengah hiruk-pikuk itu, muncul pula jenis baru berupa organisasi non-pemerintah (Ornop), yang sering juga disebut organisasi sosial-kemasyarakatan.

Ketika represi dikalahkan(?) melalui peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II, menjadi pertanyaan pula, adakah sebuah LSM yang menggunakan ukuran dalam negeri/domestik, ataukah yang menggunakan nilai-nilai yang dipakai LSM internasional? Ini penting dipertanyakan karena ia mempersoalkan dua jenis LSM/Ornop. Yaitu, yang menggunakan ukuran internasional, seperti kemutlakan untuk menghancurkan kekuatan politik TNI, dan mengembalikan mereka ke barak. Ini berarti, generalisasi/*ta'mim* atas terjadinya

pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh TNI di masa lampau sebagai sebuah struktur. Hal ini ditentang oleh LSM/Ornop yang berorientasi domestik. Bagi mereka, tidak dapat dilakukan generalisasi terhadap sebuah struktur seperti itu.

Yang harus dilakukan, menurut pandangan ini, adalah tindakan hukum atas para pelaku dalam sebuah struktur atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang mereka lakukan. Bukannya hukuman atas sikap tunggal terhadap sebuah lembaga/struktur, seperti yang dilakukan oleh Mary Robinson dari komisi tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (*Un High Commision On Human Right*), yang ingin mengembalikan TNI ke barak. Menurut pandangan ini, kita harus menghukum individu yang bersalah dan dapat ditemukan bukti-bukti legalnya, bukannya lembaga/struktur yang ada. Yang tidak dapat ditemukan bukti-bukti legalnya, haruslah direkonsiliasikan.

Tradisi LSM/Ornop ini, sudah beratus-ratus tahun hidup di kalangan bangsa kita. Dalam masya-rakat Jawa, tradisi ini tercermin dalam episode ke-lanjutan pertentangan Sultan Hadiwidjaya melawan menantunya, Sutawidjaya, dalam *triangle* (segitiga) Demak, Pajang, dan Jipang. Sutawidjaya yang me-menangkan pertarungan fisik, akhirnya menggunakan gelar *Panembahan Senopati Ing Alogo Sayyidin Panoto-gomo Khalifatullah Ing Tanah Jawi*, dan menjadikan dirinya sebagai pembangun Dinasti Mataram Awal.

Sebaliknya, Sultan Hadiwidjaya yang dikalahkan sang menantu itu, lari ke ibunya yang berada di Pulau Madura. Sultan yang bergelar Pangeran Karebet, dan juga Jaka Tingkir ini, memperoleh empat puluh buah kesaktian/*kanuragan* dari ibunya, yang kini dimakamkan di Asta Tinggi (di sebuah pulau yang termasuk ke dalam Kabupaten Sumenep sekarang ini). Kejadian ini direkam oleh tembang Jawa yang sangat terkenal *Sigra milir, sang gethek sinangga bajul, kawandasa cacahipun*, (segera melaju rakit yang didukung buaya, empat puluh ekor bilangannya). Tembang ini sangat populer di kalangan manusia Jawa yang berbudaya, menggambarkan isi nasihat sang guru kepada Jaka Tingkir.

Dalam perjalanan kembali dari Pulau Madura ke Pajang, ia singgah di Pulau Pringgoboyo dan malamnya mendapat impian/*vision* dari gurunya. yang melarangnya kembali ke Pajang untuk memperebutkan takhta kerajaan. Ia akan menjadi korban, seperti halnya penumpang rakit yang akan dimakan buaya pendukung apabila ia terjun ke air. Dengan demikian, berawallah sebuah tradisi bagi pihak yang hidup di luar pemerintahan dan tidak mengikutinya. Yang penting kekuatan itu secara nominal mengakui kekuasaan pemerintah yang ada, dengan tetap menyelenggarakan kehidupan yang tidak mengikuti pola yang ditetapkan pemerintah.

Pesantren, konggregasi gereja, dan padepokan kepercayaan telah menunjukkan kualitas ini, dan

pemelihara semangat/spirit demokrasi yang terorganisir di negeri kita. Berbeda halnya dengan penduduk urban di kota-kota, yang secara terbuka menjadi alternatif kultural bagi sistem kekuasaan sampai saat ini. Tanpa mengingat hal ini, kita tidak akan memahami proses demokratisasi di negeri kita, yang berbeda dari proses yang sama di negeri-negeri lain. Di sinilah tradisi memegang peranan penting dalam sebuah proses, yang berarti kita tidak boleh mengambil alih begitu saja nilai-nilai bangsa lain bagi diri kita.

Kenyataan semacam ini jarang diperhatikan orang, apa-lagi kalau kita hidup bergantung kepada bantuan keuangan dari LSM internasional. Ketergantungan yang menimbulkan pandangan dan sikap yang sama dengan LSM-LSM internasional itu, merupakan sebuah tendensi keliru yang harus kita pantau terus-menerus. Kegagalan untuk memahami hal ini di kalangan media massa internasional jelas tampak dalam kasus Tiannanmen. Sikap Chiang Chemin, Chu Rongzi, dan kawan-kawan yang lebih mementingkan keutuhan teritorial China yang tidak federalistik, kalau perlu dengan menghadapkan tank kepada para demonstran dari kalangan mahasiswa, sebagaimana direkam oleh gambar yang sangat terkenal, membuat mereka dikecam sebagai anti-demokratik. Padahal mereka mengembangkan demokrasi secara bertahap, menurut visi mereka sendiri. Penggunaan ukuran ganda ini harus diperhitungkan apabila kita tidak menginginkan penghadapan berbagai nilai

secara keliru. Universalitas ukuran dicapai me-lalui penerapan berbagai cara pandang dan tidak begitu saja menyerah pada pandangan dominan dari negara-negara maju/adi kuasa dan LSM-LSM internasional.

Penerapan pandangan ganda ini, menurut penulis, haruslah menjadi titik utama memperjuangkan demokrasi di negeri kita. Keberhasilan pondok pesantren, konggregasi gereja, dan padepokan kepercayaan untuk turut membentuk pandangan alternatif dari masyarakat, tanpa menentang pemerintah yang ada waktu itu, merupakan sesuatu yang harus dicatat pula, di samping kiprah Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Fordem, dan berbagai institusi lain dalam menentang rezim otokratik yang ada. Berbeda dari dan menentang pemerintah yang ada, adalah dua sisi dari mata uang logam yang sama. Kalau ini tidak dipahami, kita akan berkelahi di antara sesama kawan sendiri yang hanya akan menguntungkan mereka yang sebenarnya bersikap anti-demokrasi. Sikap a priori sama sekali tidak menguntungkan bagi tegaknya demokrasi.

Osaka, 14 Februari 2002

Membaca Sejarah Lama (17)

Suku Asmat di tanah Papua memang primitif, kalau ditinjau dari sudut pandang teknologis, yang kerap kali dipakai sebagai ukuran oleh "masyarakat maju industri". Perisai yang mereka pakai, tombak yang mereka gunakan, dan pakaian yang sangat sedikit mereka kenakan, memang primitif kalau diukur dari kacamata "masyarakat modern". Apalagi cara mereka berkomunikasi, dengan tidak menggunakan alat-alat modern, membuat kesimpulan bahwa mereka masih primitif—seolah-olah benar. Struktur sosial yang mereka kembangkan, karena tidak berdasarkan administrasi berskala besar, dianggap tidak sesuai kebutuhan kita sebagai "manusia modern".

Dilupakan, bahwa orang-orang Asmat sebagai unit-unit kecil di belantara tanah Papua telah berhasil menyelamatkan diri dari Malaria dan penyakit-penyakit lain di daerah itu. Begitu pula, mereka dapat mengembangkan kehidupan di tengah-tengah lingkungan alam yang ada tanpa melakukan pengrusakan atas kehidupan itu sendiri, merupakan prestasi tersendiri yang harus dipahami secara seksama. Akumulasi begitu banyak kegiatan mereka dalam bentuk yang

dianggap primitif itu dilupakan orang dan sekarang tinggal menjadi tontonan (*kitsch*) belaka, yang dijual oleh pariwisata modern sebagai eksotika, untuk dinikmati para wisatawan/wati luar dan negeri-negeri lain. Apalagi yang berstatus wisman (artinya, wisata= wan asing yang banyak uangnya).

Bagaimana mengintegrasikan mereka ke dalam "masya-rakat modern" sering kali diputuskan hanya oleh para birokrat yang dididik oleh sistem "pendidikan modern", tanpa melibatkan orang-orang Asmat itu sendiri. Ini terjadi berulang-ulang kali, dan akan tetap terjadi, bila tidak ada perubahan dalam sikap kita sebagai bangsa.

ঙ

Jika orang-orang Asmat mengalami hal itu dalam ke-rangka hidup bersuku di tanah Papua, penduduk desa di Bali mengalaminya melalui penghadapan Subak dan Banjar yang dihadapkan pada sisitem "administrasi modern". Pemakaian tanah rotatif di pedesaan Bali itu dinilai tidak efektif, karena tidak membawakan iming-iming pemilikan tanah yang digarap dan pencapaian target-target individual warga masyarakat.

Tentu saja Subak dan Banjar sebagai sistem kehidupan meminta para warga untuk membagi kerja dan pendapatan, yang tidak memungkinkan muncul-nya pengusaha kelas kakap dan petani kaya. Dilupakan bahwa, selama berabad-abad kedua sistem itu berhasil

memelihara masyarakat petani di Bali dalam jumlah yang besar di tanah yang sempit. Dengan demikian, kedua sistem itu berhasil menghindarkan penyakit keserakahan yang sering menghinggapi "masyarakat modern".

Masalahnya, dalam pandangan penulis, terletak pada bagaimana mencapai keseimbangan antara keduanya, yaitu bagaimana membuat warga masyarakat berpenghasilan tinggi dan memiliki daya beli yang sangat besar tanpa membuat mereka serakah dan merugikan orang lain. Ini adalah inti pengembangan kapitalisme rakyat (*folks-capitalism*), sebagaimana berhasil ditumbuhkan di negara-negara industri maju dan demokratis. Para petani dan buruh, secara individual, mendapat penghasilan tinggi dan mencapai daya beli yang besar. Inilah tantangan yang harus dijawab baik oleh para ekonom perancang industrialisasi dan agribisnis maupun para sosiolog yang berkepentingan dengan pelestarian berbagai institusi, seperti Subak dan Banjar.

ɞɞ

Pemerintahan kolonial Hindia-Belanda yang menjinakkan masyarakat Cirebon dengan menciptakan berbagai kerajaan dan kesultanan, kasepuhan, kanoman, dan keprabonan di kawasan itu, merupakan bukti dari kemampuan pemerintahan kolonial untuk menerapkan kebijakan *devide et impera* seperti itu, yang diterapkan di tempat-tempat lain dalam bentuk yang berbeda. Dalam hal ini yang digarap oleh mereka

adalah penghadapan berbagai institusi satu terhadap yang lain, supaya mereka melakukan netralisasi terhadap peranan masing-masing "lawan". Pengkaplingan kekuasaan itu memang merupakan inti dari kebijakan kolonial berupa kebijakan *devide et impera* tersebut.

Masyarakat Cirebon, dengan demikian, tidak memiliki panutan yang jelas, sebagai akibat kekuasaan lembaga-lembaga itu lebih banyak bersifat moral. Dalam hal ini dapat ditunjuk dalam kasus makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung. Orang yang ingin langsung menuju makam, baru dapat melakukannya jika diizinkan atau didampingi salah seorang sultan atau prabu yang ada. Dengan demikian, kekuasaan itu hanyalah berwatak *ceremonial* belaka, berbeda halnya dengan kekuasaan bupati atau walikota. Kasus rumah penjara kabupaten yang akan dijadikan mall, dengan rumah penjara baru dibuat di luar kota adalah bukti tidak adanya kekuasaan sultan atau prabu itu.

Jelaslah dengan demikian, ketiga jenis masyarakat suku, budaya adat, dan kekuasaan pemerintah harus diperhitungkan dengan teliti dalam proses modernisasi yang berlangsung. Kalau di kalangan orang-orang Asmat, pimpinan suku harus diperhitungkan, itu berarti harus menjadi partner kita dalam proses modernisasi. Begitu juga dengan budaya Subak dan Banjar di Bali, jelas menunjuk pentingnya arti para pemimpin adat dalam proses modernisasi. Sedangkan modenisasi di daerah Cirebon bersangkutan dengan birokrasi

pemerintah daerah. Hal inilah yang harus dipertimbangkan pimpinan TNI, para pemimpin gerakan mahasiswa, para ulama, dan pimpinan partai-partai politik dalam mengemudikan upaya pencarian format modernisasi yang diperlukan oleh bangsa kita saat ini.

Seoul, 15 Februari 2002

Membaca Sejarah Lama (18)

Dalam bukunya, *Heretical Imperative,* Peter Burger dari Boston University, mengemukakan sesuatu yang sangat menarik. Ia menggambarkan seorang petani Jawa, yang sedang mencangkul di sawah yang kemudian menghentikan ayunan cangkulnya, untuk sekadar memandang pesawat terbang Garuda yang sedang menderu 25.000 kaki di atas kepalanya. Boleh jadi, ia kagum dengan teknologi modern yang dapat menciptakan pesawat seperti itu, dengan lebih dari 100 penumpang di dalamnya. Tetapi, mungkin juga ia justru teringat kepada mitos mengenai burung Garuda, yang menjadi kendaraan Dewa Wisnu nun-jauh di atas. Dalam hal ini, terjadi mistifikasi suatu hal yang dalam pandangan sejarah tidak pernah ada.

Mistifikasi atas hal-hal yang bersifat historis adalah sesuatu yang sangat lazim dalam kehidupan kita. Penulis sendiri, sewaktu berumur 5 tahun, sering membukakan pintu rumah, di Jl. P. Diponegoro, Jakarta, bagi seorang tamu yang mengatakan; adakah ayah penulis di rumah? Kalau penulis menjawab positif, orang itu lalu menyatakan agar penulis mem-beri tahu sang ayah, bahwa ada Pak Husein ingin

ketemu. Laki-laki berbaju biru, dengan kulit hitam yang datang setelah magrib itu, kemudian dirangkul oleh ayah penulis dan mereka berciuman sangat hangat, seperti layaknya dua orang bersaudara yang sudah lama tidak bertemu. Baru menjelang 40 tahun kemudian, sebelum wafat, ibu penulis mengatakan bahwa Pak Husein itu adalah Tan Malaka.

Padahal dalam benak kita, terjadi mistifikasi atas diri seorang komunis, apalagi ia menjadi anggota komintern pada waktu itu, di bawah pimpinan Yosef Stalin. Menurut mistifikasi tersebut, seorang komunis tentunya digambarkan tegap dan besar, dan menggunakan nama samaran yang membedakannya dari orang biasa. Bukankah ia adalah tokoh misterius yang selalu hidup di bawah tanah dan harus mampu menyembunyikan idenditas dirinya? Dengan mistifikasi seperti itu, ia tampak menjadi lebih pandai dari orang biasa dan lebih mampu menyembunyikan diri. Padahal dalam kenyataan fisik, ia tidak demikian, seperti Tan Malaka.

ଓଓ

Sekali lagi, salah satu mistifikasi yang terjadi adalah tokoh-tokoh NU. Para kiai yang mendirikan dan yang kemudian memimpin organisasi tersebut, adalah orang-orang tradisional yang sering dianggap konservatif. Karena penampilan mereka, baik dalam berpakaian maupun mengatur rumah, sepintas lalu mereka tampak konservatif. Apalagi mereka tidak mampu berbahasa Barat (Inggris dan Belanda), dan

tidak pernah berpendidikan formal "sekolah umum". Mistifikasi seperti itu merupakan kenyataan bahwa mereka belajar logika melalui kitab-kitab *ilmu mantiq*, dan ketiga perangkat *fiqh, ushul fiqh,* dan *qawa'idul fiqh*, mengajarkan kepada mereka bagaimana harus memperlakukan kehidupan secara praktis.

Apalagi, kalau mereka harus mempelajari sastra Arab dan sejarah Islam, seperti penulis. Dengan mempelajari sastra Arab, seseorang harus mengikuti produk-produk yang menjadi khazanah keindahan sastra dan bahasa Arab. Dari ke tujuh sajak bergantung (*al-mu'allaqat as-sab'ah*) di dinding Ka'bah saja, orang akan mendapatkan keindahan bahasa, pengalaman, dan visi kehidupan berbeda-beda dari orang Arab selama lebih dari 1500 tahun. Ungkapan-ungkapan dan susunan kalimat yang sangat menarik dari para penyair, dibentuk oleh penggunaan kata-kata indah, akan menghanyutkannya ke dalam khayal yang bersifat kepahlawanan, romantisme, dan geniusitas manusia Arab, belum lagi realitas kehidupan serba bagai.

Dari sejarah Islam, seseorang akan memperoleh gambaran mengenai keluasan hidup manusia-manusia muslim dari berbagai kawasan di dunia. Tentu manifestasi kehidupan orang-orang Kano di sebelah utara Nigeria, tidak sama dengan cara hidup tropis yang membentuk manusia Asia Tenggara. Para ahli fiqh/ hukum Islam di jazirah Arabia dua-tiga abad yang lalu, tentu tidak akan merumuskan hukum agama

yang sama dengan rumusan Kiai Arsyad al-Banjari, yang dikuburkan 200-an tahun silam di Kelampaian, Martapura, Kalimantan Selatan. Hukum *perpantangan* dalam soal pewarisan yang dikemukakannya dalam *corpus magnum* beliau, *Sabiila al-Muhtadien* (ini menjadi nama Masjid Agung Kota Barjarmasin), seluruhnya berpijak pada budaya air dari sungai besar di pulau tersebut, seperti Mahakam dan Barito. Menurut hukum *perpantangan* ini, yang harus diperoleh suami dan istri adalah hasil usaha bersama. Karena sang istri yang menjaga keamanan perahu dan menanak nasi, ketika berlabuh di tepian sungai, sedangkan sang suami masuk ke hutan untuk mengumpulkan hasil-hasilnya, hingga kalau salah satu meninggal dunia, itu harus diparo untuk diberikan kepada yang masih hidup, dan selebihnya dibagi menurut aturan waris.

ଓଓ

Mistifikasi yang sama juga terjadi atas sejarah lama kita. Selalu tergambar di benak kita sikap ramah dan kasih (*benevo-lence*) dari raja-raja Jawa yang, kalau digabungkan dengan gambaran sebagai raja yang adil, akan memperlihatkan seorang tokoh yang penyabar, cinta kepada rakyatnya, berpandangan jauh ke depan, dan mampu menyantuni orang lain. Padahal, Sultan Agung Hanyokrokusumo sering kali bercengkerama dengan para dayang di atas panggung/gazebo di Tamansari yang dikelilingi air dan di beberapa tempat di kelilingi daratan seperti pulau, lengkap dengan

pepohonannya. Di situlah Sultan Agung sering memerintahkan dilepaskannya para tahanan politik yang tidak bersenjata, dan dikejar-kejar banyak buaya. Beliau menikmati jeritan orang-orang yang beberapa waktu kemudian di makan sang buaya.

Begitu juga mistifikasi yang terjadi atas raja Jawa yang menjalani hari penobatan (*coronation, jumenengan*) mengikuti salah satu paham pra-Islam. Pada malam sebelumnya, ia harus melakukan hubungan seksual dengan Ratu Roro Kidul guna memperoleh kekuatan untuk memerintah negeri. Untuk keperluan itu, diambillah seorang gadis yang sangat cantik dari negeri itu, untuk pada malam harinya dimasuki roh beliau dan disetubuhi oleh sang calon raja. Ini semua dilakukannya di hutan terdekat dengan kraton. Bukankah ini sebuah mistifikasi yang belum pernah terbukti kebenarannya sama sekali? Kalau memang ini benar, bukankah ini sebuah mistifikasi, karena siapa yang dapat menjamin merasuknya sukma Ratu Roro Kidul ke dalam diri perempuan cantik yang digunakan untuk itu?

Dengan demikian, jelaslah bahwa mistifikasi atas fakta-fakta sejarah memang terjadi dalam perjalanan panjang setiap bangsa. Tugas para sejarawan adalah memisahkan fakta sejarah dari mistifikasi, dan dengan demikian, memisahkan kenyataan sejarah dari legenda. Kegagalan seorang sejarawan untuk melakukan pemisahan seperti itu hanya akan berujung pada penafsiran yang salah atas sejarah. Karena itu, sering kali

kita harus berhati-hati terhadap kecenderungan untuk mencari tema-tema besar dalam memahami sejarah masa lampau kita sendiri. Terutama dalam memisahkan mana yang faktual dan mana yang mitos dari "kebesaran" kerajaan-kerajaan masa lampau, seperti Majapahit dan Sriwijaya.

Jakarta, 23 Februari 2002

Membaca Sejarah Lama (19)

Penafsiran atas sejarah dapat dibagi dalam dua hal, yaitu penafsiran umum yang dapat terjadi atas sejarah semua bangsa, seperti yang dilakukan Arnold Y. Toynbee dalam *A Study of History* yang kolosal itu (sebelas jilid). Sebaliknya, ada yang hanya mengkhususkan diri pada kerangka analisis khusus untuk sebuah kelompok manusia saja. Contoh dari pendekatan khusus ini adalah karya O. Spengler, yaitu *Untergang des Abenlandes,* yang hanya khusus membicarakan bangsa-bangsa Barat. Menurut analisisnya, sebuah bangsa akan menempuh masa formatif, masa dewasa, dan masa lanjut. Dan, menurutnya lagi, "bangsa-bangsa Barat" sudah berada di usia lanjut dan berada di masa senja, tinggal menunggu kehancurannya.

Mengenai kerangka yang digunakan Toynbee itu, ia menunjuk pada sebuah proses, yaitu tantangan (*challenge*) dan jawaban (*response*), yang berlaku bagi semua bangsa. Ia menyimpulkan, umpamanya, bahwa kerajaan-kerajaan besar selalu lahir di tepi sungai-sungai besar, seperti Mesir di tepi Sungai Nil, Sumeria di tepi Sungai Tigris, dan Euphrate (kawasan Mesopo-

tamia, di Irak sekarang). Contoh ini dapat dite-ruskan dengan Beijing di tepi Sungai Hwang Ho, Mohenjodaro di tepi Sungai Indus, Majapahit di tepi Sungai Brantas, dan Sriwijaya di dekat Sungai Musi.

Tepi sungai dalam pandangan Toynbee memberikan banyak tantangan, seperti banjir, penguasaan pelayaran sungai, dan pengamanan daerah-daerah tepi sungai. Kalau jawaban yang diberikan tepat adanya, akan terjadi akumulasi kekuasaan dan kemampuan untuk menjawab tantangan, karena akumulasi itulah yang menjadi jawaban yang diperlukan untuk menciptakan kerajaan yang besar. Hanya saja, teori ini tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, mengapakah ada kerajaan-kerajaan besar yang tidak terletak di sungai yang besar pula? Sedangkan tantangan yang dihadapi tidak pernah dijelaskan, bagaimana mengukurnya?

Yan Romein, seorang sejarawan berkebangsaan Belanda, melihat perkembangan sejarah dari sudut lain. Dalam buku-nya, *Aera Europa,* yang diterjemahkan dalam tahun-tahun 50-an ke dalam bahasa kita, ia melihat adanya sebuah Pola Kemanusiaan Umum (*Algemeene Mensehyk Patroon*) di dalam melihat sejarah semua bangsa. Pola Kemanusiaan Umum (PKU) ini memiliki tanda-tanda keyakinan agama tradisional, jalan hidup, masyarakat yang agraris, dan kekuatan raja yang sangat besar. Ini ia dapatkan dalam sejarah setiap bangsa.

Ketika terjadi krisis moral yang melanda umat manusia di sekitar abad VI SM, timbullah dua jenis reaksi yang sangat berbeda. Di kalangan semua bangsa, terjadi penyegaran moral, dengan sang moralis memperoleh penghargaan tinggi dan menjadi panutan sejak itu. Akhnaton di Mesir, Zarathustra di Persia, Budha Gauthama di India, dan Loutse dan Konghuchu di daratan China, menjadi contoh-contoh moral yang diikuti orang hingga saat ini.

Berbeda halnya dengan Eropa, yang menempuh jalannya sendiri. Dimulai dari para filosof Yunani Kuno, yang mengemukakan rasionalitas sebagai ukuran tindakan manusia, maka terjadilah penyimpangan Eropa dari PKU di atas. Melalui supremasi hukum dalam Pax Romans, pengorganisasian yang rapi oleh gereja Katolik, dilanjutkan oleh masa pencerahan/*Aufklarung*, diteruskan oleh rasionalitas yang bertumpu pada pendekatan empirik, munculnya revolusi industri, dilanjutkan dengan abad ideologi dan abad XX M, yang membawakan ketidakpastian ideologis. Semuanya itu membuat bangsa-bangsa Eropa pada akhirnya mengalahkan PKU dan memaksa PKU untuk mengikuti garis hidupnya atas nama "kemajuan".

❧

Begitu banyak kerangka ditawarkan oleh para sejarawan kita, tetapi tidak ada satu pun yang dapat menerangkan perjalanan bangsa-bangsa dengan kepastian yang memuaskan. Karena itu, datanglah godaan untuk menganggap memang tidak ada kerangka

yang tepat untuk itu. Bukankah semua kerangka yang ditawarkan memiliki pengecualian-pengecualiannya sendiri? Inilah yang membuat kita ragu-ragu menggunakan kerangka penafsiran apa pun untuk memahami sejarah manusia.

Keragu-raguan seperti itu patut pula diragukan karena jangan-jangan memang ada penafsiran yang layak digunakan. Bukankah keengganan menerima sebuah kerangka pemahaman dan penafsiran atas sejarah bangsa-bangsa timbul dari sikap yang terlalu menganggap benar hal-hal yang sifatnya rasionalistik? Karenannya, sikap yang benar adalah memahami sebuah cara penafsiran secara tuntas untuk digunakan pada sebuah kasus saja, dengan tidak menempuh cara generalisasi (*ta'mim*) apa pun. Biarlah sejarah melakukan selebihnya, karena kita tidak puas dengan satu metode penafsiran pun.

Mungkin cara dewasa seperti ini memang diperlukan dalam memahami sejarah dunia. Hidup manusia yang begitu kaya dengan hal-hal yang tidak dapat dimasukkan kerangka apa pun, tentunya menolak penafsiran tunggal, betapa agungnya sekalipun kerangka yang digunakan. Di sinilah, sejarah harus menundukkan kepala menghormati wewenang filsafat. Pada titik inilah kita menghormati analisis falsafi, seperti yang dilakukan Ortega Y. Gasset dalam *Rebellion de la Massas,* yang pada akhirnya, masa-lah yang menentukan segala-galanya.

Jakarta, 23 Februari 2002

Membaca Sejarah Lama (20)

Oleh M. Yamin, kita dibuat terlena akan kebesaran Majapahit, dengan deskripsinya mengenai kebesaran laut kerajaan tersebut—dari Madagaskar di Afrika Timur hingga Pulau Tahiti di lautan Pasifik. Penulis sendiri terpana oleh uraian Yamin itu, apalagi ia mengungkapkannya dengan gaya berapi-api dan menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa yang faktual. Bahkan, ada sejarawan yang mengungkapkan bahwa sang merah-putih telah berkibar di kedua lautan itu sejak 6000 tahun yang lalu.

Baru belakangan penulis mengetahui bahwa *claim* itu tidak menggunakan fakta sejarah yang lengkap, tetapi sebagian ditopang dengan data tidak historis, dan dengan demikian terjadi distorsi kesejarahan yang cukup fatal. Akibatnya, hampir keseluruhan rekonstruksi sejarah itu tidak dapat dipertahankan secara objektif, dan dengan sendirinya rekonstruksi yang dilakukan harus diulang kembali dengan ketelitian dan kemauan besar untuk mencari kebenaran.

Dalam sebuah buku "1492", dikemukakan bahwa penemuan Benua Amerika oleh Columbus,

bukanlah satu-satunya kejadian besar yang mengubah jalannya sejarah dunia. Minimal ada empat kejadian lain yang mempunyai bobot yang sama. *Pertama*, ketika para pelaut Eropa menembakkan senjata-senjata api ke arah pasukan sebuah kerajaan di Afrika Tengah. Penembakan senjata api yang dilakukan di daerah pantai itu memaksa kerajaan tersebut berpindah ke pedalaman, karena ada "setan yang menggunakan lidah api". Dengan kepindahan itu, leluasalah para pelaut Eropa berlabuh di pantai kawasan barat Afrika itu untuk mengisi air segar bagi kapal-kapal layar mereka dalam perjalanan ke tanjung harapan (*cape ofgood hope*) di Afrika Selatan. Dari sana mereka meneruskan perjalanan ke pantai Timur Afrika, pantai Barat India, dan kawasan Asia Tenggara.

CS CR

Hal *kedua* yang patut diperhatikan adalah diangkatnya seorang anggota keluarga Borgia menjadi seorang paus melalui suapan, perempuan cantik, dan tekanan-tekanan lain. Dengan demikian, *skisma* antara gereja Katolik-Roma dan orang-orang Kristiani lainnya tidak dapat dicegah lagi. Lahirlah protestantisme, yang juga menurut seorang sejarawan ekonomi titik bermulanya etika kapitalistik: mengejar keuntungan dan kebahagiaan dunia, sama artinya dengan mencari kebahagiaan akhirat. *Skisma* besar inilah yang mewarnai pertarungan negara-negara Eropa dalam memperebutkan negara jajahan pada abad ke-18,19, dan 20 M.

Peristiwa *ketiga*, terjadi ketika wangsa yang berkuasa di Polandia berhasil mengalahkan Wangsa Muskovite di Rusia dan merebut ibu kota Moskwa. Timbul pertanyaan, haruskah bahasa Polandia dijadikan bahasa nasional di Polandia dan Rusia, dengan konskuensi bahasa Rusia harus digusur sebagai bahasa nasional. Ternyata para penguasa Polandia itu memilih untuk membiarkan bahasa Rusia sebagai bahasa nasional mereka, dan dengan demikian, bahasa Polandia dibatasi hanya berlaku bagi bangsa Polandia saja, tidak sebagai bahasa nasional orang-orang Rusia. Dalam dua generasi, bangsa Rusia berhasil mengalahkan Wangsa Polandia tersebut, dan bahasa nasional Rusia—setelah itu, menjadikan negeri tersebut sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Baru satu abad kemudian Uni Soviet yang menjadi kekuatan dunia dihancurkan dan timbullah beberapa negara kecil sebagai gantinya. Kalau saja tidak ada Uni Soviet, maka kebesaran Rusia pun tidak akan terwujud.

Kejadian *keempat*, yang menggoncangkan dunia menurut buku tersebut, adalah naiknya seorang menteri peperangan Tiongkok menjadi Wali-Raja (*Regent*) yang masih kecil. Ternyata, ia adalah seorang pengikut agama Konghuchu yang fanatik dan ia merasa takut jika kaum China di perantauan akan kembali ke daratan Tiongkok dan membeli tanah-tanah dengan keuntungan yang mereka peroleh di tanah rantau. Kaum rantau (Hoa Kiau) China itu, pada umumnya beragama Islam dan mereka tersebar dari Madagaskar di Afrika Timur dan Pulau Tahiti di

Lautan Pasifik. Kalau mereka berhasil membeli tanah-tanah di daratan Tiongkok itu, maka Islam akan dominan di daratan China. Karena itulah, ia memerintahkan semua kapal-kapal China di rantau dipanggil pulang ke pantai China untuk dibakar dan dihancurkan pada abad ke-17 M sebagai akibat para keturunan orang-orang China itu, terutama di kawasan Asia Tenggara, tidak dapat bersikap lain kecuali menjadi pribumi.

❧

Dari beberapa contoh di atas, tampak jelas bahwa proses sejarah sangatlah dipengaruhi oleh keinginan, berbagai kecenderungan, dan proyeksi yang sangat mempengaruhi jalannya sejarah. Setelah terputusnya kontak antara tanah rantau dan tanah asal, memang peranan interpretasi menjadi sangat penting. Baru setelah pemerintahan kolonial Belanda mendatangkan pekerja dan pedagang kecil Tionghoa ke mari, muncullah perantau keturunan Tionghoa yang kita kenal selama ini—yang umumnya beragama Budha atau Konghuchu. Makanya, kalau kita tidak mengerti akan hal ini, kita tidak mengerti sejarah. Karena itulah, penulis mencoba "menggali penafsiran-penafsiran' yang bertanggung jawab.

Rekonstruksi kesejarahan yang dihasilkan proses pemahaman seperti ini, paling tidak akan mengisi kekosongan pemahaman yang terjadi selama ini. Dengan demikian, masih diperlukan sebuah penelitian lebih mendalam tentang masa lowong dari pe-

manggilan kapal-kapal laut China untuk dibakar di pantai Tiongkok abad ke-17 M, hingga munculnya kaum rantau China di negeri ini yang beragama Budha dan Konghuchu abad ke-18 M.

Rasa nasionalisme kita tidak boleh menghilangkan objektivitas sejarah kita. Inilah pendekatan yang benar yang harus kita laksanakan, kalau kita memang benar-benar bersikap ilmiah. Banyak penggalian yang harus dilakukan, perekaman elektronik dan tertulis mengenai bahan-bahan sejarah yang diperlukan. Sekadar sebagai contoh, S. M Kartosuwiryo sebenarnya diperintah oleh atasannya Jenderal Besar Sudirman untuk membentuk Darul Islam (DI) di kawasan Jawa Barat, untuk mengisi kekosongan, akibat Perjanjian Renville yang menentukan Republik Indonesia hanya meliputi kawasan Jawa Tengah, untuk mencegah kekosongan kawasan Jawa Barat dari kita sebagai bangsa maka dibuatlah DI. Bahwa ia kemudian berkembang menjadi sebuah pemberontakan adalah masalah lain.

Jakarta, 26 Februari 2002

Membaca Sejarah Lama (21)

Penulis pergi ke Medan untuk melantik pimpinan pengurus wilayah sebuah partai politik, dengan ditemani oleh beberapa orang. Dari sana, setelah acara pelantikan di siang harinya dan dialog antaretnis-agama-budaya di malam harinya, penulis dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan ke kota Padang Sidempuan (Tapanuli Selatan) melalui Rantau Prapat di Kabupaten Labuhan Batu, setelah sarapan pagi di rumah bupati. Lama perjalanan diperkirakan memakan waktu sekitar 13,5 jam melalui darat, berangkat dari Medan pukul 22.30 WIB malam dan sampai di tujuan pukul 11.30 WIB siang.

Dari Tapanuli Selatan, penulis melanjutkan perjalanan ke Pesantren al-Musthofawiyah, Purba Baru, di Kabupaten Baru, Mandailing Natal. Dikatakan Kabupaten baru, karena sang bupati belum mempunyai rumah dinas sendiri, tetapi tinggal di mess pemerintah daerah, di ibu kota kabupaten yang baru tersebut. Nama ibu kota ini sangat menarik, yaitu Penyabungan, kota kecamatan, yang akhirnya menjadi ibu kota kabupaten dan nantinya akan jadi kota yang ramai, karena menjadi pusat kegiatan kabupaten yang baru tersebut.

Letak Penyabungan sekitar 90 menit dengan berkendaraan mobil dari Padang Sidempuan, dan juga sekitar 90 menit dari perbatasan Sumatra Barat, menunjukkan arti strategis kota tersebut. Mengapa kota itu yang terpilih menjadi ibu kota kabupaten baru Mandailing Natal tersebut? Kita belum tahu jawaban persisnya, tapi mungkin masalah jarak dan adanya sebuah pesantren seperti Purba Baru, yang letaknya hampir 1/4 jam perjalanan dari ibu kota kabupaten tersebut.

Kata "Penyabungan" dapat berarti tempat pengadu ayam jago, seperti yang terjadi di beberapa kawasan lain di negeri kita. Tetapi, di kabupaten baru ini, kata tersebut mempunyai arti tempat menyabung nyawa dan mengadu hidup untuk mempertahankan keyakinan agama. Di tempat itulah, di masa lampau, penyebaran agama Kristen di tanah Batak dihadapi dengan bersenjata oleh kaum muslimin, yang terdiri dari orang-orang Mandailing. Maka, terjadilah pertempuran fisik yang memakan korban sangat banyak di kedua belah pihak, yang untungnya sekarang sudah tidak diingat lagi oleh kedua belah pihak.

Ternyata, agama Kristen dan Islam dapat hidup berlapis-lapis di kawasan tersebut. Di utara Tapanuli Selatan hampir seluruhnya beragama Kristen, Padang Sidempuan ke selatan kebanyakan penduduknya beragama Islam. Tetapi, di tengah-tengah antara Padang Sidempuan dan Penyabungan, ada komunitas Kristen

yang diduga penulis adalah sisa-sisa mereka yang bertempur di Penyabungan. Di kawasan itulah sekarang kaum muslimin dan Kristen Protestan hidup berdampingan secara damai, dan berhubungan secara ekstensif dalam hampir semua bidang kehidupan.

Sikap saling pengertian itu sekarang tercapai, mungkin karena persamaan bahasa yang dipergunakan dan persamaan keturunan. Mereka sepenuhnya adalah warga raja-raja tradisional yang lama, yang masih berkuasa menentukan nasib warga tersebut. Itulah sebabnya, orang-orang dari berbagai marga di kawasan tersebut melarikan diri ke kota-kota besar di negeri kita, seperti orang-orang marga Nasution dan Batubara yang bisa dijumpai di hampir seluruh kota besar di Indonesia.

ଔ

Lain halnya kalau kawasan tersebut dibandingkan dengan nama kota 'Medan' di Sumatra Utara. Kata 'Medan' menurut salah seorang anggota DPR RI, Aris Siagian, adalah tempat berlaga dan mengadu kehidupan. Hanya saja, ia lebih merupakan tempat mengadu nasib bagi sejumlah kaum etnis yang berlomba-lomba mencapai kesenangan hidup. Orang China, orang Keling, dan orang Melayu beradu secara ekonomis. Namun, ia juga merupakan tempat beradu budaya antarmanusia dari berbagai daerah, seperti orang-orang Batak, Melayu, dan Jawa. Terkenal sekali istilah *Puja Kesuma*, yang berarti Putera Jawa Kelahiran Sumatra. Mereka adalah keturunan pekerja-pekerja

perkebunan yang didatangkan pihak Belanda. Sejak pertengahan abad ke-19 M hingga sepertiga abad yang lalu, merekalah yang kemudian terkenal dengan sebutan *Jadel*, yang berarti keturunan Jawa dan Deli.

Sebagai tempat berlaganya berbagai faktor tadi, dengan sendirinya adat kebiasaan di Medan juga berbeda dari tempat-tempat lain di negeri-negeri kita. Di Medan, orang harus bersuara lantang dan bersikap keras untuk diperhatikan orang lain, dengan sendirinya merupakan anti-tesis dari budaya Jawa, yang justru mengutamakan sikap diam. Itulah sebabnya, lahir istilah *Puja Kesuma*, yang menggambarkan orang berbahasa Jawa atau berasal dari etnis Jawa, namun memiliki kelantangan dan sikap menantang (*forcefull*) orang Batak. Pengertian inilah yang ditekankan (alm.) Adam Malik dengan istilah "Buaya Deli", bukannya sikap kebuayaan yang umumnya dipakai di kawasan-kawasan lain negeri kita.

Ini pula yang dialami penulis dalam sebuah dialog dengan berbagai pihak di kota Medan. Seorang mahasiswa mengusulkan agar semua perkebunan negara dikembalikan saja kepada rakyat dalam proses swastanisasi. Dengan tenang penulis menjawab bahwa gagasan itu berasal dari paham (*small is beautiful*) yang dibawakan Schumacher dalam salah satu bukunya. Tentu, gagasan idealistik ini untuk memperhitungkan keharusan bersaing bagi ekspor pertanian kita yang hanya dapat dikelola oleh perkebunan-perkebunan besar yang berada di lingkungan perusahaan-per-

usahaannya (BUMN). Bahwa selama ini terjadi korupsi dan penyelewengan oleh manajemen PTP-PTP, tidak berarti penghapusan mereka secara menyeluruh dari kehidupan ekonomi kita. Kita harus melakukan efisiensi, menghilangkan korupsi, dan me-larang KKN di lingkungan PTP-PTP, namun tidak membubarkan mereka.

☙❧

Jelas dari perbandingan di atas, bahwa Medan sebagai tempat mengadu nasib secara budaya dan ekonomi, memiliki latar belakang lain daripada Penyabungan, ibu kota Kabupaten Mandailing Natal yang menjadi tempat pertempuran agama (Islam dan Kristen Protestan) di masa lampau. Pemecahan berbentuk kerukunan antarumat beragama, di Penyabungan, yang antara lain diakibatkan oleh persamaan bahasa dan keluarga, patut dicontoh oleh kelompok-kelompok berbagai agama, terutama di Ambon dan Poso. Sebaliknya, di Medan kita lihat beradunya kekuatan-kekuatan budaya dan ekonomi yang saling bertubrukan, yang bagaimanapun juga haruslah dijaga jangan sampai meledak dengan akibat-akibatnya yang negatif.

Padang, 26 Februari 2002

Membaca Sejarah Lama (22)

Kekuasaan birokrasi pemerintahan di negara kita menunjukkan kecenderungan semakin terpusatnya kekuasaan. Ini terjadi di masa lampau ataupun pada saat ini, sebagaimana digambarkan baik oleh sejarah resmi ataupun oleh cerita-cerita tutur. Mereka menggunakan nama yang berbeda-beda dari satu ke lain tempat ataupun dari satu ke lain generasi. Sebagaimana gambaran Charles Issawi, seorang ahli sejarah ekonomi dari Libanon, tentang masyarakat Mesir.

Mesir, menurut Issawi, tetap akan digenggam oleh birokrasi pemerintahan, karena para birokrat adalah penjelmaan Tuhan di muka bumi dalam bentuk *Pharao*/Fir'aun. Mereka digantikan oleh para sultan yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi (*khalifah*), sebagaimana sudah ditentukan dalam sistem tata negara yang dianggap "Islami". Sikap yang memandang rendah kelompok-kelompok lain di luar birokrasi dalam pemerintahan, juga diteruskan oleh pemerintahan penjajahan Turki dan lain-lainnya. Di bawah sosialisme, birokrasi pemerintahan juga sangat berkuasa, sesuai dengan ajaran sosialisme. Seharusnya, di alam *infitah* (keterbukan), yang diperkenalkan

(alm.) Presiden Anwar Sadat, peranan birokrasi pemerintahan itu berkurang, tetapi dalam kenyataan tidak demikian. Sampai hari ini pun, peranan itu tetap besar dan tidak berkurang.

Demikian juga peranan birokrasi sangat besar dalam kehidupan negara-negara yang dianggap maju teknologinya, dan mereka sering memelihara independensi yang sangat kuat. Contohnya, mantan Menteri Luar Negeri Jepang Makiko Tanaka, yang kehilangan jabatan pada bulan ini karena Perdana Menteri Koizumi tidak mau berhadapan dengan wakil menteri luar negeri, yang di Jepang diisi seorang birokrat dan sekarang kebetulan berwatak sangat independen. Ternyata, pemimpin pemerintahan yang berasal dari dunia politik, kalah berhadapan dengan seorang dari dunia birokrasi.

ઉ૪

Pertentangan antara faksi-faksi di lingkungan birokrasi pemerintahan bukanlah barang baru dalam sejarah kita. Ia dapat berbentuk pertentangan institusional antarfaksi, seperti antara kelompok Santana dan kelompok Nayaka dalam sejarah Banten lama, yang akhirnya melumpuhkan birokrasi itu dan memungkinkan munculnya kelompok ulama yang turut memerintah, seperti Kiai Chatib dan Kiai Sam'un. Adakalanya juga pertentangan tidak bersifat institusional, seperti para Wiraguna dalam lingkungan Dinasti Mataram, melawan para abdi dalem lainnya.

Dalam masa penjajahan kolonial Hindia-Belanda, birokrasi pemerintahan sipil-Melayu (*ash*) ditundukkan kepada birokrasi kolonial yang lebih efisien. Ternyata, sebagian cara-cara mereka telah diambil alih oleh birokrasi pemerintahan orang-orang asli, tanpa pengambilalihan jiwanya. Dengan demikian, bukannya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, melainkan sebaliknya, yang berupa pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan mereka. Hal itulah yang menjiwai birokrasi pemerintahan kita saat ini, apalagi dengan masuknya orang-orang militer ke dalam lingkungan birokrasi pemerintahan tersebut.

Karena itu, secara perlahan-lahan tetapi pasti harus diusahakan pengikisan peranan birokrasi pemerintahan kita, dari birokrasi yang minta dilayani masyarakat, menjadi birokrasi yang melayani kebutuhan masyarakat tanpa imbalan apa pun. Kelebihan sistem pemerintahan kita saat ini, yaitu administrasi tunggal pemerintahan bagi seluruh Indonesia, haruslah dijaga baik-baik, dan keburukan-keburukan administrasinya harus diganti dengan hal-hal baru yang lebih efisien dan *luwes*. Otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan dapat menolong kita dalam upaya ini, tanpa membahayakan keutuhan sejuta birokrasi pemerintahan yang kita miliki.

ଓଃ

Contoh dari cara ini adalah penegakan sistem *Nagari* di Sumatra Barat. Sistem tersebut telah lama ada dan pernah diperkosa dan dihilangkan artinya

dalam masa Orde Baru. Sudah saatnya kita perbaiki sistem *Nagari* itu dalam waktu beberapa tahun ke depan. Kegagalan dalam hal ini akan berakibat munculnya kembali kekuasaan birokrasi pemerintahan yang absolut, dan ini akan membuat reaksi yang juga berlebihan dari masyarakat. Keberhasilan sistem ini, sebaliknya, akan mampu menampung suara-suara positif berupa kritik-kritik perbaikan dari masyarakat tanpa menghilangkan kelangsungan hidup birokrasi pemerintahan tersebut.

Semula, kekuatan rakyat terpusat pada mata rantai Perguruan Tarbiyah dan sebagainya, tetapi datangnya tentara pemberontakan PRRI membuat pimpinan perguruan tersebut berebut memasuki pemerintahan. Untuk keperluan itu, mereka mencoba menguasai kepemimpinan Golkar yang waktu itu menjadi satu-satunya jalur bagi mereka untuk masuk birokrasi pemerintahan. Kekuasaan birokrasi pemerintahan menjadi sangat besar, atas kerugian gerakan-gerakan masyarakat/rakyat. Di sinilah kekuasaan birokrasi pemerintahan selama hampir 40 tahun mengalami *overdosis*, alias menjadi terlalu besar.

Hal inilah yang membuat penulis berkeyakinan, bahwa harus ditemukan keseimbangan yang lebih mencerminkan kenyataan, antara birokrasi pemerintahan kita dan kekuatan rakyat. Kegagalan mencapai hal ini hanya akan menyengsarakan orang banyak karena akan timbul reaksi berlebihan, yang akan menimbulkan kekuatan politik radikal berdasarkan

tuntutan etnis, agama, budaya, dan bahasa yang terlalu besar. Sekarang saja, suara-suara akan pentingnya putera daerah bagi jabatan-jabatan lokal sudah banyak yang berbentuk kepentingan etnis. Ini dapat membahayakan keutuhan sistem pemerintahan kita bagi seluruh Indonesia di masa depan.

Jakarta, 27 Februari 2002

Membaca Sejarah Lama (23)

Sewaktu penulis ke Tapanuli Selatan (Tap-Sel), baru-baru ini, ia diterima oleh seorang raja adat yang memberikan *kain ulos* dan tutup kepala kepadanya, di samping menjamu makan siang secara adat. Setelah itu, ia ikut serta dalam mobil yang ditumpangi, hingga di sebuah pesantren di atas tanah miliknya, seluas sepuluh hektare dan disediakan bagi sebuah pembangunan pesantren di atas. Ia bercerita kepada penulis tentang impiannya mengenai pesantren itu. Yang menarik adalah apa yang diperhatikan penulis, sebagai raja yang memimpin adat, ia justru dengan kata-katanya mencoba menghubungkan hukum adat dan pendidikan Islam. Untuk itu, ia mendirikan sebuah pesantren yang mau tidak mau merupakan sebuah gerakan agama, berbentuk lembaga pendidikan.

Ini sejalan dengan tindakan gereja Kristen Protestan di tanah Batak yang mengusulkan agar seorang raja pemimpin adat, yaitu Sisingamangaraja XII diangkat sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah. Di sini, tampak penghargaan dari sebuah gerakan agama, yaitu gereja Kristen Protestan yang *notabene*

adalah sebuah gerakan agama, untuk menghargai seorang raja adat. Di sini, terlihatlah hubungan simbiotik antara raja sebagai sebuah institusi dan gerakan agama, juga sebagai institusi. Hal ini dapat dijumpai dalam sejarah lama kita di segala penjuru tanah air.

Jelaslah dengan demikian, betapa hubungan saling mendukung terjadi antara raja adat dan gerakan agama. Karena keduanya adalah institusi yang berakar pada tradisi, dengan sendirinya tradisi kedua belah pihak berpilin menjadi satu dalam hubungan saling mendukung dan memberikan legitimasi. Hal inilah yang sering membuat pusing kalangan kaum pembaru yang mengatasnamakan "modernitas" yang ingin memaksakan kehendak atas keduanya. Kalau keinginan me-reka itu tidak didengarkan oleh kedua belah pihak, maka baik raja maupun gerakan agama yang bersangkutan dianggap kolot.

Penampilan yang saling bertentangan dalam fungsi, baik institusi yang modern maupun lembaga yang kolot, juga dialami oleh Kraton Yogyakarta, tegasnya oleh Hamengkubuwono. Sebagai lembaga yang "modern", ia dianggap berpengaruh besar dalam pengembangan pariwisata di daerahnya. Tapi, sebagai institusi yang "kolot", seorang sultan dibenarkan oleh sejarah untuk mengembangkan wayang dan sebagainya, sebagai bentuk tradisional dari kesenian daerah. Bahkan, seorang Sultan Hamengkubuwono me-

lindungi kaum pembaru dan kaum tradisional yang dianggap "kolot" di kalangan umat Islam.

Sejarah mencatat bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan pembaru dalam Islam, didirikan dan dipimpin oleh KH. Ahmad Dahlan tahun 1912. la adalah seorang penghulu kraton (Danuredjo) yang tidak mau terikat dengan mazhab hukum agama mana pun. Semboyannya, "jangan hidup dari Muhammadiyah, melainkan hidupi Muhammadiyyah", tak lain adalah sebuah pendekatan baru dalam kehidupan kaum muslimin. Begitu juga titik berat kegiatannya dalam soal-soal pendidikan, kesehatan, dan kerja-kerja sosial sangatlah berjiwa baru.

Sebaliknya, kraton juga berpegang pada hal-hal tradisional, seperti "Masjid Pethok Negoro", antara lain di Wonokromo dan Mlangi. Para kiai yang memimpin masjid-masjid tersebut sering bersikap kolot, dan Sultan harus melindungi mereka. Karena itu, ia pun dianggap tradisional dan "kolot" juga. Karena ia mewakili sebuah institusi, dengan sendirinya lembaga yang dipimpinnya, yaitu kraton, juga berwatak sama. Sekarang kraton juga menjadi tempat berlangsungnya semaan, yang tadinya dirintis oleh Kiai Hamim Jazuli dari Ploso Kediri, sering juga dikenal dengan nama Gus Miek.

Fungsi ganda lembaga tradisional kita, selain membawa pembaruan dan memelihara kekolotan sekaligus, adalah sesuatu yang tak perlu diherankan.

Memang masyarakat bangsa kita demikian itu halnya, dan hal ini justru menjadi kekuatannya. Justru bagaimana memelihara tradisi dan sekaligus mengambil hal-hal baru adalah tanda kematangan. Di sini berlakulah adagium NU: "memelihara yang baik dari masa lampau, sambil menyerap hal-hal baru yang lebih baik" (*Al Mukhdfadzatu 'ala al-Qadimi ash-Shalih, wa al-Akhdzu bi al-Jadid al-Ashlah*). Dengan demikian, institusi yang mewakilinya, seperti pondok pesantren dan masjid-masjid, memiliki watak yang sama. Hal inilah yang perlu dikatakan dengan rinci kalau kita ingin mengetahui NU secara mendalam. Hal ini yang sering tidak diperhatikan orang karena keasyikan ingin "memodernkan" organisasi ini.

Kecenderungan melakukan modernisasi dengan mencari sesuatu yang relevan dari masa lampau, sering dilakukan tanpa disadari. Greg Barton, seorang peneliti dari Universitas Deakin di Geelong, Australia, menyebut dalam disertasinya tentang empat orang pembaru Islam seperti itu. Keempat perubahan itu, menurutnya, adalah intelektual muslim neo-modernis. Dimaksudkan dengan kata tersebut, yakni kemampuan memandang masa depan dengan tidak tercerabut dari akar-akar tradisi masa lampau. Salah satu dari keempat orang itu, menurut Barton, adalah Dr. Nurcholish Madjid, yang dinilainya sebagai pemikir yang menghormati warisan budaya masa lampau, seperti tersimpan dalam buku-buku/kitab-kitab lama. Literatur lama (*al-Kutub al-Muqarrarah*) itu adalah sumber yang memelihara tradisi, lengkap dengan kekolotannya. Ia

berperan untuk memelihara agar pembaruan yang terjadi tidak tercerabut dari akar-akar budaya lama.

Jelaslah dari uraian di atas, bahwa baik raja-raja adat maupun para intelektual neo-modernis adalah pelaku-pelaku sejarah yang mementingkan kontinuitas (persambungan) dalam melakukan pembaruan. Mereka bukanlah orang-orang yang *males* berpikir, melainkan berhati-hati dalam melakukan tindakan. Kita mencapai modernitas sebagai bangsa, tanpa harus terpecah belah antara yang kolot dan yang modern. Semuanya memperoleh tempat dalam kehidupan bangsa yang demikian banyak jumlahnya. Inilah makna sebenarnya dari semboyan nasional: Bhinneka Tunggal Ika, yaitu persatuan dalam keragaman.

Jakarta, 28 Februari 2002

Membaca Sejarah Lama (24)

Peter Carey, dalam salah satu bukunya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berbicara tentang ekologi budaya orang Jawa. Ia menguraikan berbagai pandangan tentang Pangeran Diponegoro yang memimpin peperangan melawan Belanda. Perang itu dalam sejarah Belanda disebut sebagai "Pemberontakan Diponegoro", sedangkan dalam literatur asing lainnya disebut sebagai perang Jawa (1825-1830). Perang tersebut walaupun hanya berlangsung selama lima tahun besar sekali pengaruhnya terhadap jalan pikiran orang Jawa.

Menurut Carey, ada tiga pandangan mengenai peristiwa tersebut, yang termuat dalam "Babad Diponegoro", "Kidung Kebo" dan "Babad Kraton Surokarto". Ketiga naskah itu, oleh Carey, dianggap sebagai ekologi budaya dari peristiwa itu, dan dari pemahaman tentang ekologi budaya itu kita akan memperoleh gambaran tentang struktur pemikiran orang Jawa. Tanpa menghiraukan lahan dan corak ekologi itu, kita akan mencapai kedangkalan pemahaman atas peristiwa penting, seperti Perang Jawa itu, dan berarti juga tentang hal-hal lain dalam sejarah lama kita.

Jadi, jelaslah bahwa kita tidak dapat menggunakan hanya satu sudut pandangan raja apalagi yang bersifat tunggal, yang biasanya berisikan "penafsiran resmi" atas sebuah kejadian sejarah. Upaya memaksakan "kebenaran kita" sebagai "ke-benaran sejarah" juga harus mengikuti sikap ini, yang akan mematikan kreativitas kita. Sejarah, bagaimanapun juga, adalah sesuatu yang lahir dari kancah pertentangan, karena itulah kita memerlukan segenap pandangan yang dapat digali.

❧

Dapat dikemukakan dalam hal ini sebuah karya penting dari Kraton Kartosuro tentang KH. Ahmad Mutamakin dari Kajen, Pati. Di zaman Amangkurat (entah ke-1 atau ke-2, penulis lupa), Kiai Ahmad Mutamakin dipanggil ke Kartosuro dan dihadapkan kepada Ki Ketib Anom, yang masih keturunan Sunan Kudus dan, pada saat itu, menjabat sebagai penghulu kraton. Dalam tembang "Serat Cabolek", yang dijadikan bahan Raden Soebardi untuk menyusun disertasi guna memperoleh gelar doktor di Monash University pada akhir tahun 60-an atau awal tahun 70-an, dikemukakan bahwa Kiai Mutamakin (dalam kidung tersebut, Kiai Mutamakim) dijelaskan meminta maaf kepada Ki Ketib Anom karena ia mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari versi kraton dalam hal agama. Ia dimaafkan oleh Ki Ketib Anom, dan itulah inti dari kidung di atas. Nama Cabolek mengingatkan penulis pada nama kota Zabuli di Iran, sedangkan kota

Kajen juga mirip dengan kota Kasyan di negeri yang sama, yang telah melahirkan—beberapa puluh tahun yang lalu—Ayatullah Kasani yang menentang Inggris-AS dan mendukung Perdana Menteri Mossadeg.

Namun, dalam acara haul beliau di Kajen, desa tempat kelahiran dan kediaman KH. A. M. Sahal Mahfudz, Kiai Mutamakin ini justru dibacakan tembang lain hingga beberapa tahun lalu, dalam mana dituturkan bahwa ia akhirnya diambil menantu oleh raja. Ini berarti, ia yang menang dalam perdebatan melawan Ki Ketib Anom, dari cerita mana kita tahu bahwa ia membawakan pandangan politik yang revolusioner, dan menolak pendekatan kultural yang dibawakan oleh Amangkurat.

Jelaslah dari tembang tersebut bahwa kita harus menggunakan sumber yang berlawanan dalam menilai sebuah kejadian sejarah. Kegagalan memahami hal ini membawa konsekuensi versi sejarah yang kita kemukakan akan menjadi pin-cang. Apalagi kalau kita ingat uraian Dr. Kuntowidjoyo, bahwa Bupati Riva'i dari Batang, pada abad ke-19, menggunakan "Serat Cabolek" itu sebagai senjata politik, ketika ia menghadapi perlawanan bersenjata dari sejumlah ulama. Dengan kata lain, versi Kraton Kartosuro ini dijadikan alat pemberi legitimasi oleh Bupati Riva'i guna memaksa para ulama yang mengadakan perlawanan bersenjata terhadap dirinya dalam menghentikan perbuatan ini.

Terkadang kita tidak memperoleh sumber-sumber yang jelas mengenai sebuah perkembangan menarik dalam sebuah perjalanan bangsa kita. Umpamanya saja, titik temu Hindu-Budha di negeri kita tidak ada sumber-sumbernya. Yang ada hanyalah peninggalan berupa Candi Prambanan di timur Yogyakarta, yang berbeda dari Candi Hindu di Kalingga (Dieng) dan Candi Budha di Borobudur. Kepindahan umat Hindu-Budha dari Klaten ke Kediri di Jawa Timur sekarang di bawah pimpinan Darmawangsa, yang kemudian menyatakan diri sebagai Prabu, juga tidak jelas keterangan tertulisnya. Ketika kemudian gabungan Hindu-Budha ini melahirkan konsep *Bhairawa* (sekarang disebut Birawa), kejadian itu pun dinilai hanya sepintas lalu dalam sejarah kita, padahal ia kemudian melahirkan imperium Majapahit.

Kelangkaan sumber tertulis ini sering membuat kita harus melakukan rekonstruksi sejarah atas masa lampau kita untuk membaca runtuhnya Kerajaan Kalingga yang beragama Hindu di pegunungan Dieng itu. Dengan menyebutkan munculnya percampuran Hindu-Budha saja, juga merupakan sebuah kerja yang gegabah, karena Kerajaan Kalingga itu sirna karena munculnya budaya campuran Hindu-Budha di Jawa Tengah, di samping datangnya Islam dalam bentuk tarekat Qodiriyah di kawasan yang sama. Di Desa Candirejo, puncak Dieng, tidak jauh di pusat Kerajaan Kalingga, terdapat kuburan Syaikh Abdullah Qutbuddin, pembawa tarekat Qodiriyah pertama kali di Pulau Jawa. Penulis harus berjalan kaki tiga setengah kilo-

meter jauhnya, beberapa tahun yang lalu, untuk mencapai makam tersebut, melintasi dua buah sungai tanpa jembatan, pematang sawah, dan tanah-tanah perawan yang melintasi sebuah lembah untuk mencapainya.

Bukankah ini membuktikan terulangnya kembali apa yang disebut oleh Arnold J. Toynbee dalam *From Oxus to Indus*; Masyhad yang merupakan kota makam Sayyidina Ali di Afghanistan, mengalahkan Balkh yang merupakan pusat kerajaan, setelah berjalan beberapa abad di Afghanistan. Pertempuran kultural antara kawasan kuburan melawan pemerintahan juga masih terasa saat ini di negeri kita: komplek Ampel melawan daerah Tugu Pahlawan di Surabaya, ataupun Luar Batang melawan Gambir-Kuningan di Jakarta.

Paso, 4 Maret 2002

Membaca Sejarah Lama (25)

Selama ini kita menganggap perempuan berperan sebagai pelengkap saja. Padahal, secara sosiologis, antropologis, dan kesejarahan kita sangat menghargai perempuan jauh lebih tinggi daripada di kawasan-kawasan Asia Selatan, Asia Barat, dan Timur Tengah. Ia mungkin disebabkan adanya ketentuan hukum Islam (*fiqh*) formal, bahwa perempuan hanya berhak atas separo bagian dari pewaris laki-laki. Dengan demikian, dilupakan bahwa ketentuan formal tersebut tidak sepenuhnya berjalan karena telah ada kenyataan lapangan dari masa pra-Islam. Kalau hal ini dilupakan, kita hanya melihat masyarakat muslim dari keterangan tertulis kitab-kitab suci dan penalaran formal lebih jauh dari ketentuan-ketentuan tersebut, tanpa meninjau kemungkinan bahwa terdapat kesenjangan sangat besar antara teori dan praktik.

Dari waktu ke waktu kita melihat upaya pemikir-pemikir muslim untuk mencoba menutupi kesenjangan sangat besar antara tradisi pra-Islam yang tetap berjalan dari satu pihak dan ketentuan formal yang ada dalam literatur non-keagamaan yang masih ada. Karena dangkalnya pengetahuan agama yang dimiliki,

maka penulis ingin meminta perhatian semua pihak untuk menjawab tebakan/teka-teki, apa beda antara sapi dan sapi'i. Jawaban teka-teki itu adalah: sapi berekor di belakang, sedangkan sapi'i...

Kesenjangan antara kenyataan pra-Islam dan ketentuan formal hukum Islam di sisi lain, terletak pada kemampuan budaya kita untuk menerima kenyataan itu. Namun, dalam kenyataan, ekspresi tradisi Islam di negeri ini menunjukkan adanya perbedaan tersebut. Ungkapan apa yang dianggap praktik pra-Islam bercampur dengan aturan-aturan hukum Islam (*fiqh)*, tampak antara lain pada kenyataan akan adanya peranan besar dari ninik-mamak dalam menentukan segala sesuatu yang berkenaan dengan keputusan sang ibu dalam masyarakat Minangkabau yang *matriarchal.* Peranan mereka sangat besar dalam pengambilan keputusan, tetapi hal itu harus dilakukan atas nama sang ibu.

CSED

Dalam kenyataan sehari-hari, para perempuan di daerah Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal, mereka bercocok tanam di sawah, dengan konsekuensi mereka jugalah yang me-nentukan penggunaan hasil-hasil pertanian. Penulis tidak tahu, apakah hal itu disebabkan oleh adat pra-Islam, ataukah oleh banyaknya orang-orang daerah itu dari jenis laki-laki yang melakukan perantauan. Ini berarti, ada kesenjangan yang besar antara hukum waris Islam yang digunakan di daerah itu, yang dicoba untuk dijembatani oleh penamaan

praktik-praktik bertani seperti itu sebagai sesuatu yang bersifat pra-Islam. Maka, diperlukan sebuah penelitian mendalam untuk memungkinkan kita mengambil kesimpulan yang tepat. Karenanya, kita tidak boleh demikian saja mengambil kesimpulan.

Hal yang sama juga terjadi di Bali, di kalangan mereka yang tidak beragama Islam, yakni mereka yang beragama Hindu. Di kawasan tersebut, orang-orang perempuan bekerja di bawah terik matahari untuk membuat jalan. Adakah ini karena adat pra-Islam, ataukah karena tekanan-tekanan ekonomi dalam beberapa dasawarsa terakhir ini? Hal ini berarti sangat diperlukan adanya penelitian mendalam mengenai tempat perempuan dalam kehidupan di kawasan tersebut dari dahulu hingga sekarang. Ini belum lagi dilihat adanya keperluan akan penelitian mendalam mengenai tokoh-tokoh perempuan di kawasan ini, meliputi berbagai masa.

Di tahun 60-an, perempuan juga menjadi pengangkut kelembak berpuluh-puluh kilogram sekali jalan di kawasan Magelang, Jawa Tengah. Ini juga tidak memberikan kejelasan mengenai apakah praktik tersebut timbul dari adat pra-Islam, ataukah dari tekanan-tekanan ekonomi. Dari Kopeng ke Magelang, atau dari Kaliangkrik di barat sampai ke tengah pasar di kota yang berjarak belasan kilometer. Para perempuan yang memanggul kelembak itu bercakap-cakap dengan suara yang keras antarmereka, sebagai pemandangan sehari-hari yang sangat memilukan hati.

Penulis sendiri di era tersebut pernah dibonceng oleh siswi sendiri di Bogowanti dekat Borobudur, dan ia katakan bahwa itu semua dilakukannya untuk menghormati sang guru, padahal penulis sendiri dibesarkan dalam suasana harus memuliakan perempuan. Dapat dibayangkan, betapa besar rasa risau penulis ketika itu.

ঙ্গ

Nah, sejarah justru memaparkan betapa besar tempat yang diduduki perempuan dalam kehidupan di Asia Tenggara, secara antropologis. Ini membawa konskuensi berupa kebolehan atau wewenang sang perempuan untuk turut aktif dalam kehidupan, di samping laki-laki. Bahwa yang tampak di mata hanyalah 'kewajiban perempuan' untuk melakukan kerja-kerja kasar belaka, itu adalah perwujudan yang tampak di bawah. Dalam masa penuh kesulitan, hal itu tampak semakin nyata. Apakah beda perempuan penggendong kelembak di Magelang, bilamana dibandingkan dengan perempuan penyapu jalanan di Romania, atau perempuan teman penulis bekerja tengah malam pada tahun 1971 di Schalke, dekat Koln di Jerman Barat waktu itu, untuk bekerja di waktu larut hingga pagi, di sebuah percetakan? Sama dalam prinsip dan corak, walaupun dalam tingkat keuangan yang berbeda.

Dengan "kemajuan" di segala bidang, kita berangsur-angsur melihat semakin banyaknya perempuan menduduki profesi yang dahulunya hanya dipegang

oleh kaum laki-laki saja. Sudah biasa bagi kita sekarang pada permulaan abad ke-21 M, melihat perempuan sebagai sopir bus malam antara Jakarta dan Surabaya. Kita tidak lagi bertanya, bagaimana nasib anak-anak mereka di rumah yang diasuh oleh para suami? Itu adalah hal "biasa", seperti halnya perempuan yang menjadi pemilik toko dan juga perempuan muda yang menjadi pra-muniaga di toko-toko kita. Jadi, sedang berlangsung sebuah perubahan besar dalam kehidupan warga masyarakat, terle-pas dari agama yang dipeluk. Baik orang-orang muslim, umat Kristiani, maupun orang-orang Hindu, tanpa pandang bulu menduduki berbagai posisi dalam kehidupan, dengan kon-skuensi mereka menduduki jabatan atau melaksanakan tugas yang beragam pula dari "bawah", seperti buruh kasar dan pramuniaga, hingga "ke atas", seperti Ibu Maria Ulfah Santoso dan Ibu S. K. Trimurti yang dahulu jadi menteri maupun Ibu Widowati Wiratmo Sukito (keduanya sudah almarhumah, dan pernah menjadi hakim agung. Jelaslah dengan demikian, agama apa pun yang kita peluk di kawasan ini, dalam kenyataannya tidak pernah menghambat perempuan dan apa yang mereka ingini.

Kenyataan antropologis dan sosiologis memainkan peranan juga dalam kehidupan seorang pemeluk agama, terlepas dari hukum agama formal yang dianut masing-masing. Berbahagiakah kita karena hal ini, atau justru kita harus meratap? Sejarah jualah yang dapat menjawabnya.

Surabaya, 8 Maret 2002

"Mungkinkah terjadi proses demokratisasi yang sebenarnya kalau hanya membicarakan nasionalisme dalam memperebutkan kekuasaan negara..."

Abdurrahman Wahid

LKiS